

**DAMPAK KONFLIK AMBON TERHADAP UPAYA
MENARIK INVESTOR ASING KE PROPINSI
MALUKU**



Skripsi

*Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada Jurusan Ilmu
Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional dan Mendapatkan Gelar
Sarjana*

Oleh :

SUNARDI IDRIS

Stb. 45 00 023 015

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR**

2005

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : **DAMPAK KONFLIK AMBON TERHADAP UPAYA
MENARIK INVESTOR ASING KE PROPINSI MALUKU**

Nama : **Sunardi Idris**

Stambuk : 4500023015

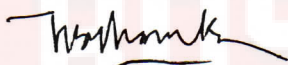
Jurusan : Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Hubungan International

Telah mengikuti Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar, guna Sarjana Negara (S1) pada Jurusan Ilmu Polotik Program Studi Hubungan Intenational.

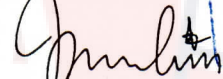
Disetujui :

PEMBIMBING I



DRS. H. Husain Hamka, MS

PEMBIMBING II



Muslimin, S. Sos



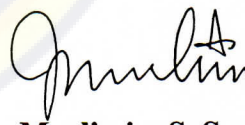
Mengetahui dan Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik
Universitas "45" Makassar



DRS. H. Husain Hamka, MS

Ketua Jurusan Ilmu Politik Program
Studi Hubungan International
Universitas "45" Makassar



Muslimin, S. Sos

Tanggal Pengesahan :2006

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini Sabtu Tanggal Sembilan belas Bulan November Tahun Dua Ribu Lima Skripsi dengan Judul : **DAMPAK KONFLIK AMBON TERHADAP UPAYA MENARIK INVESTOR ASING KE PROPINSI MALUKU**

Nama : Sunardi Idris
Stambuk : 4500023015
Jurusan : Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Hubungan International

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara (S1) pada Jurusan Ilmu Polotik Program Studi Hubungan Intenational.



Prof. Dr. H. Abu Hamid
Rektor Univ. 45 Makassar

Rengawas Umum



Drs. H. Husein Hamka, MS
Dekan FISIP Univ. 45 Makassar

Panitia Ujian :

Drs. H. Misbahuddin Achmad, MS
Ketua

Muslimin, S. Sos
Sekretaris

Tim penguji :

1. Drs. H. Misbahuddin Achmad, MS
2. Drs. Aspiannor Masrie, MA
3. Drs. Syamsuddin maldun, M. Pd
4. Drs. A.M. Rusdi Maidin, SH, M. Si

ABSTRAKSI

DAMPAK KONFLIK AMBON TERHADAP UPAYA MENARIK INVESTOR ASING KE PROPINSI MALUKU. *SUNARDI IDRIS* : Dibimbing oleh Bapak *Drs. H. Husain Hamka, MS* selaku Pembimbing I dan Almarhum *Drs. Mulyadi Sukardi, M.si*, yang telah digantikan dengan Bapak *Muslimin, S. Sos* sebagai Pembimbing II. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Hubungan Internasional Universitas “45” Makassar.

Pembahasan Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemaparan secara deskriptif dan komparatif tentang dampak konflik Ambon terhadap investasi asing di Propinsi Maluku berdasarkan kondisi di masa damai dan kondisi dimana Propinsi Maluku dilanda konflik hingga sekarang. Dalam Pembahasan penelitian ini pula peneliti menggambarkan tentang upaya dan langkah – langkah pemerintah Propinsi Maluku untuk menghadirkan dan meningkatkan investasi asing di Propinsi Maluku serta kendala – kendala yang dihadapi..

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif eksplanatif. Jenis data yang digunakan ini adalah data primer yang penulis peroleh langsung dari sumber pertama selama proses penelitian, dan data sekunder yang telah disiapkan oleh berbagai instansi atau institusi yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu : (a) studi literatur dan (b) studi lapangan / wawancara. Data yang telah penulis peroleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisa secara kualitatif.

Dalam rangka meningkatkan perekonomian suatu daerah tentunya diperlukan suatu kondisi yang aman dan stabil, ini menjadi faktor penentu yang tidak bisa dibantahkan. Propinsi Maluku sebagai salah satu daerah yang juga sangat tergantung atas masuknya penanaman modal asing, beberapa tahun yang lalu dihadapkan

dengan sebuah peristiwa kemanusiaan/konflik Ambon yang cukup dhasiat. Peristiwa yang mengakibatkan instabilitas keamanan di Propinsi Maluku, menyebabkan dampak aktifitas perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di propinsi Maluku tidak dapat berjalan dengan lancar, bahkan sebagian perusahaan telah ditutup akibat keselamatan berusaha yang tidak terjamin. terjadinya kelangkaan investasi khususnya investasi asing terutama oleh karena terjadinya eksodus investor asing secara besar-besaran ke daerah daerah lain yang dianggap aman , ini tentunya sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan ekonomi Propinsi Maluku dalam rangka menghadirkan para investor asing yang telah kabur serta memulihkan kondisi investasi asing yang sangat memprihatinkan ini tentunya dibutuhkan kerja keras pemerintah daerah Propinsi Maluku untuk senantiasa melakukan langkah - langkah proaktif terkait dengan upaya pemulihan keamanan, meyakinkan dan menghadirkan investor asing untuk tetap berinvestasi di Propinsi Maluku.

Langkah-langkah konkrit Pemerintah Propinsi Maluku adalah dengan mewujudkan perbaikan kembali infrastruktur dan suprastruktur perekonomian, pemulihan kondisi keamanan dengan meningkatkan keamanan pada kawasan industri khususnya pada perusahaan-perusahaan asing , memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi para investor asing yang telah kabur dan calon-calon investor asing yang akan berinvestasi di Propinsi Maluku .

KATA PENGANTAR

Selaku Insan yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sudah sepatutnya penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SAW atas limpahan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada pada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Sospol Universitas "45" Makassar.

Setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang penulis lewati dalam rangka pembuatan skripsi ini, penulis sadar bahwa tuntasnya skripsi ini tidak terlepas dari pada partisipasi dan peran aktif berbagai kalangan, terutama para pembimbing yang meluangkan waktunya serta senantiasa dengan tulus dan ikhlas memberikan saran dan arahan ilmiah-Nya, olehnya itu dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak **Drs. H. Husain Hamka, MS** selaku Pembimbing I dan Bapak **Muslimin, S. Sos** selaku Pembimbing II yang telah menggantikan Almrhum **Drs. A. Mulyadi Sukardi, MA**, Semoga Amal Ibadahnya diterima oleh Allah SWT, Amin.
2. Bapak Dekan Fakultas Sospol, Bapak Ketua Jurusan Hubungan Internasional, Bapak Penasehat Akademik.

3. Segenap staf Pengajar dan Staf Administrasi yang telah membantu baik dalam proses perkuliahan maupun dalam proses administrasi.
4. Segenap keluarga dan rekan-rekan : **Amrullah Madani Hentihu, Elham Binthalib, Muh Fauzi Hentihu. SP, Fahrizal Bachmit. SH, Amri Mukadar,** yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materil.
5. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam melewati proses ini, dan juga penulis ingin menyampaikan permohonan maaf kepada mereka-mereka yang belum sempat penulis masukan namanya dalam skripsi ini.

Pada Kesempatan ini pula penulis haturkan ungkapan hati dengan perasaan yang mendalam kepada Ayahanda Agus Idris dan Ibunda Zubaidah Hentihu tercinta serta juga Tante Fitri, Kakak Asis Agus Idris, Upik Sari Dewi, Bedzolda dan Adik Azwar Agus Idris. juga kepada Kakek dan Nenek, Almarhum Hj. Mansyur Bin Hj, Ma'ruf Hentihu dan Almarhumah Hajah Zenabun Wael, Semoga Amal Ibadah mereka diterima oleh Allah SWT, Amin. Atas Do.a, dorongan dan pengorbanannyalah penulis dapat melewati tantangan-tantangan dalam menyelesaikan pendidikan/studi strata satu (S1) pada Fakultas Sospol Universitas "45" Makassar.

Sebagai manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan, penulis sangat sadar akan berbagai kekurangan dan keterbatasan skripsi ini. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan berbagai saran, kritik dari segenap pembaca dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis senantiasa mendapatkan Ridha dari Allah SWT, Amin.

Makassar, November 2005

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

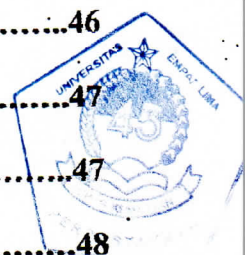
A. Latar belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	5
1. Batasan Masalah.....	5
2. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
D. Karangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	17
1. Tipe Penelitian.....	17
2. Jenis dan Sumber Data.....	17
3. Teknik Pengumpulan Data.....	18
4. Teknik Analisa Data.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepentingan Nasional.....	19
B. Konsep Pertumbuhan Ekonomi	20
C. Investasi.....	27
D. Konflik dan Resolusi Konflik.....	29
E. Konsep Otonomi Daerah.....	36

BAB III TINJAUAN UMUM

A. Gambaran Umum Lokasi.....	43
1. Keadaan Geografi.....	43
2. Penduduk.....	43
3. Angkatan Kerja.....	45
4. Potensi Sumber Daya Alam.....	46
A. Potensi Sumber Daya Perairan.....	46
B. Potensi Lahan.....	46
C. Pertambangan.....	47
D. Energi.....	47
E. Pariwisata.....	48
5. Transportasi.....	49
B. Propinsi Maluku Pada Masa Damai.....	50
C. Propinsi Maluku Pada Masa Konflik Hingga Sekarang.....	54



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Konflik Ambon Terhadap Investasi Asing

Di Propinsi Maluku.....61

B. Upaya Pemerintah Propinsi Maluku Melalui Badan

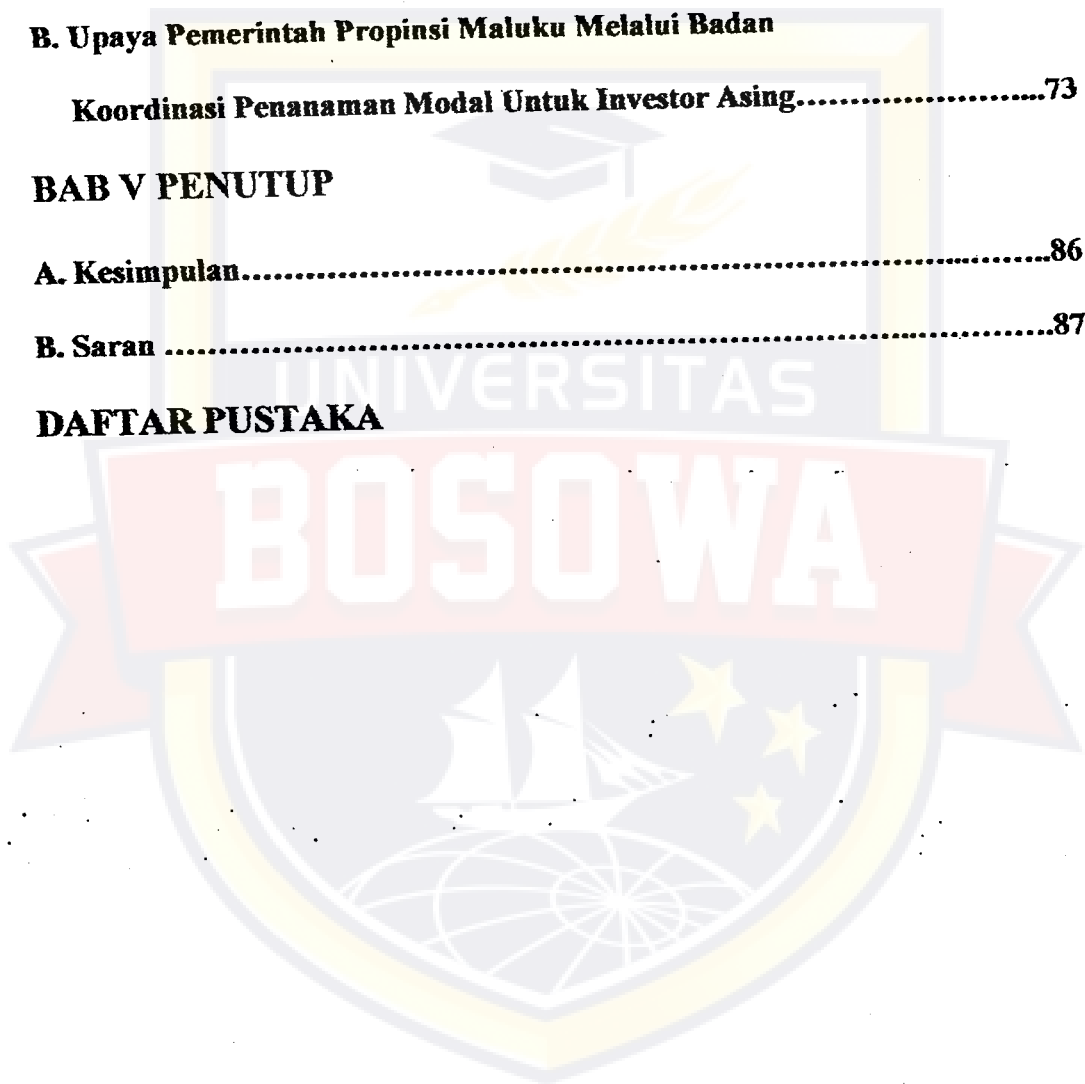
Koordinasi Penanaman Modal Untuk Investor Asing.....73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....86

B. Saran87

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sejarah hidup Indonesia selaku sebuah entitas nation state, secara historis bisa dikatakan terlalu panjang . Indonesia masih berada pada taraf awal, masih berada dalam proses "in the making". Hubungan-hubungan antara –agama dan antara-etnis didalamnya masih belum sepenuhnya "settled". belum dalam bentuk yang "final". Dalam realitasnya masih dicari hubungan yang benar-benar mencerminkan gagasan dasar sebagaimana dirumuskan oleh "*founding fathers*" republik ini. (Sumartan, 2001 : 99)

Pengalaman dari kumpulan suku dan berbagai kelompok agama menjadi sebuah kesetuan republik masih sedikit, baru mulai dan perlu diuji oleh sejarah. Munculnya banyak konflik, kesenjangan hubungan bahkan kecurigaan antar agama dan antar suku yang setiap kali memunculkannya konflik. Bahkan disintegrasi bangsa bukan ilusi yang mengada-ada. Proses disintegrasi bangsa adalah ancaman yang amat nyata. Sebab itu, diperlukan tempat berpijak bersama yang bisa memberikan prespektif guna meneropong masa depan serta melakukan langkah antisipasi terhadap munculnya konflik dan disintegrasi yang dirasakan sangat potensial tersebut.

Pada Idul Fitri, tepat 19-20 Januari 1999, konflik berdarah di Ambon mulai. Konflik itu bukan hanya meredah, melainkan meluas menyebar ke seluruh Kepulauan



Maluku. Sesuatu yang mengerikan, yang dalam sejarah Republik belum pernah terjadi, menjadi kenyataan; orang Kristen membunuh orang Muslim dan orang Muslim membunuh orang Kristen.

Bagi masyarakat yang bersangkutan, perang saudara itu mau disebut bagaimana – suatu malapetaka tanpa tara. Ribuan orang mati dan terluka, lebih dari seratus ribu pengungsi, kota-kota dan kampung-kampung hancur, dasar ekonomi pun hancur. Ratusan tahun lamanya orang-orang Maluku yang memang berjiwa prajurit dapat me-manage kehidupan bersama dengan cukup damai. Sekarang hubungan sosial itu hancur, diganti oleh nihilisme kebencian dan emosi dendam.

Sekarang konflik Maluku mengancam eksistensi bangsa. Emosi-emosi dalam masyarakat yang mendengar bahwa saudara-saudara mereka dibantai sudah sulit ditahan. Kalau konflik yang terus merambat dari Ambon ke Seram, ke Maluku Selatan, ke Ternate, ke Buru ke Halmahera, ke seluruh kepulauan Maluku, sampai meluap ke propinsi-propinsi lain akan terjadi situasi nasional yang kemungkinannya tidak dapat lagi ditangani oleh pemerintah nasional.

Siapapun dia, apabila dengan cermat mendengar dan membaca berita tentang konflik di Maluku dan Maluku Utara, apalagi yang pernah ke sana pasca kerusuhan, pasti tidak percaya, dan didalam lubuk hatinya yang paling dalam mengatakan Maluku telah hancur, Ambon bukan lagi Ambon Manise tapi Ambon hangus. Maluku yang terkenal dengan seribu pulau itu bukan lagi daerah "simbol kerukunan" antar umat beragama, tapi sebaliknya berubah menjadi daerah "simbol perpecahan" antar umat beragama. Kini yang tersisah, puing-puing gedung yang

hangus terbakar, ribuan pengungsi yang menderita akibat kelaparan, kondisi kesehatan yang buruk, dan trauma psikologi yang mereka alami. Dan yang paling parah adalah yang menjadikan konflik berkepanjangan yaitu masing-masing kelompok memakai nama "agama" sebagai alasan untuk berperang.

Upaya perdamaian bagi kedua belah pihak, sekan-akan hanya dijadikan "waktu istirahat" dan kesempatan untuk menyusun kekuatan serta strategi baru untuk kemudian melanjutkan pertikaian itu "perang sipil". Sampai akhirnya pemerintah memberlakukan wilayah Maluku dan Maluku Utara sebagai darurat sipil.

Kondisi dan situasi ini secara otomatis sangatlah berpengaruh terhadap pembangunan di berbagai sektor, terutama yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Akibat - akibat konflik yang terjadi adalah pusat-pusat perdagangan dan perindustrian yang dulunya sangat ramai serta damai, kini tinggal puing-puing bangunan yang telah hangus terbakar dan sebagiannya telah menjadi tempat-tempat yang rawan dan menyeramkan. Kondisi ekonomi Ambon semakin parah lagi ketika investor-investor asing secara bertahap meninggalkan Maluku dan mencari daerah-daerah yang lebih berprospek serta tentunya memiliki stabilitas politik dan keamanan.

Terbukanya investasi akibat otonomi, oleh dunia usaha disambut positif. Banyak daerah di Indonesia menawarkan segala potensi dan kemudahan untuk menarik para investor asing menanamkan modalnya. Ini terlihat dengan tawaran



tawaran eksploitasi sumber daya alam, intensifikasi, ataupun investasi baru. Yang diharapkan akan mendorong perekonomian daerah.

Salah satu konsekuensi diterapkannya otonomi daerah, setiap daerah tidak boleh terlampaui menggantungkan diri kepada subsidi pemerintah pusat. Mereka harus berfikir dan berjuang keras bagaimana menghidupi "dirinya sendiri" Salah satu alternatif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah menggalakan perekonomian dan perindustrian daerah, termasuk didalamnya adalah mengundang investor asing. Akibatnya, setiap daerah harus saling bersaing dengan daerah lainnya dalam upaya menarik para penanam modal dalam negeri maupun asing. Maka, masing – masing daerah harus bersaing memberikan kemudahan dan kenyamanan lingkungan berusaha kepada para investor tersebut. Di sisi lain , Kondisi Politik dalam negeri suatu negara atau suatu daerah, menjadi pertimbangan bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Hal ini tercermin dari besarnya pengaruh berbagai kerusuhan dan tindakan kekerasan yang terjadi di berbagai daerah (propinsi maluku) terhadap merosotnya penanaman modal dalam negeri maupun asing .

Paradigma baru system penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka Otonomi Daerah telah menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap tugas dan fungsi Pemerintah Propinsi Maluku di Bidang Penanaman Modal. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Propinsi Maluku bersamam-sama dengan DPRD Propinsi Maluku telah

menetapkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Propinsi Maluku.

Pada pasal 24 dan 25 Peraturan Daerah tersebut ditetapkan bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal Propinsi Maluku mempunyai tugas membantu Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Bidang Penanaman Modal.

Penanaman modal Dalam Negeri dan Modal Asing diupayakan untuk mendorong dan memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi serta memperluas usaha dan lapangan kerja. Kemudahan dan iklim investasi yang lebih menarik terus dikembangkan.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat tentu suatu daerah memerlukan sebuah keadaan yang aman dan damai, hal ini sudah merupakan persyaratan mutlak untuk pembangunan pada suatu daerah terutama berhubungan dengan pembangunan ekonomi serta peningkatan investasi asing yang dalam konteks ini adalah Propinsi Maluku..

Salah satu dampak konflik Ambon yang cukup berat dirasakan oleh pemerintah propinsi saat ini adalah bagaimana menciptakan langkah-langkah atau kebijakan yang dapat merangsang masuknya investor asing serta menciptakan situasi yang mampu meyakinkan para investor asing untuk kembali lagi berinvestasi di Propinsi Maluku, maka dengan demikian peran Pemerintah serta



kesadaran masyarakat sangatlah dibutuhkan. kedua unsur inilah yang nantinya menentukan masa depan perekonomian propinsi Maluku . Penelitian ini akan dibatasi pada upaya –upaya pemerintah propinsi maluku untuk mengatasi kelangkaan investasi asing yang diakibatkan oleh konflik .

2. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan permasalahan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh konflik Ambon terhadap investasi asing di Propinsi Maluku ?
- b. Upaya apakah yang dilakukan oleh pemerintah Propinsi Maluku Melalui BKPM dalam rangka menghadirkan investor Asing ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menggambarkan pengaruh konflik Ambon terhadap investasi asing di Propinsi Maluku.
- b. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Propinsi Maluku dalam rangka menarik investor Asing .

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai :

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hubungan internasional secara umum dan secara khusus mengenai konflik maupun pengaruhnya terhadap investasi asing.

- b. Masukan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam pembuatan kebijakan ataupun langkah – langkah taktis yang tentunya berhubungan dengan konflik dan investasi asing.
- c. Masukan bagi para investor-investor asing, pelaku-pelaku bisnis lokal maupun internasional.
- d. Salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL Universitas “45” Makassar.

D. Karangka Konseptual

Konflik adalah segala bentuk interaksi yang bersifat oposisi atau suatu interaksi yang bersifat antagonistic (berlawanan, bertentangan atau bersebrangan). Konflik terjadi karena perbedaan, kesenjangan dan kelangkaan kekuasaan , perbedaan atau kelangkaan posisi sosial dan posisi sumber daya atau karena disebabkan system nilai dan penilaian yang berbeda secara ekstrim.

Sedangkan mengutip definisi konflik yang diambil dari pendapat Wese dan Becker dalam Rusdi (2002) menyatakan, konflik atau pertentangan adalah proses sosial dimana orang perorang atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain yang disertai dengan ancaman atau kekerasan.

Konflik dapat terjadi antara individu-individu, antara kelompok-kelompok dan antara organisasi-organisasi. Apabila dua orang individu masing-masing berpegang pada pandangan yang sama sekali bertentangan satu sama lain, dan mereka tidak pernah berkompromi, dan masing-masing menarik kesimpulan-

kesimpulan berbeda-beda, dan apabila mereka cenderung bersifat tidak toleran, maka dapat dipastikan akan timbulnya konflik tertentu.

Konflik didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan disadari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Kekalahan pihak lain dianggap sangat penting dalam mencapai tujuan. Dalam konflik, orientasi kearah pihak lawan lebih penting daripada objek yang hendak dicapai. Dalam kenyataan, karena berkembangnya rasa kebencian yang makin mendalam, pencapaian tujuan seringkali menjadi sekunder sedangkan pihak lawan yang dihadapi jauh lebih penting.

Para ahli terbagi kepada 4 (empat) aliran mengenai konflik ini. Aliran pertama adalah aliran tradisional yang beranggapan bahwa konflik tersebut jelek dan karenanya harus dihindari, aliran kedua yaitu aliran hubungan antar masyarakat yang beranggapan bahwa konflik tersebut sifatnya alami dan tidak dapat dihindari dan akan selalu ada dalam suatu kelompok atau organisasi dan ia (konflik) tidak perlu ditakuti dan konflik dapat mempunyai kekuatan potensial didalam menetapkan kinerja kelompok, sedangkan aliran ketiga yaitu aliran antar aksi yang mengatakan bahwa konflik tersebut sangat dibutuhkan keberadannya dalam suatu organisasi (bisnis maupun non bisnis) guna meningkatkan efektifitas dan efesiensi organisasi, dan aliran yang keempat adalah aliran radikal yang beranggapan bahwa konflik merupakan cara untuk melembagakan perubahan yang radikal.

Salah satu faktor utama dari iklim berusaha adalah faktor keamanan. Baru-baru ini dinyatakan oleh pemerintah berdasarkan pengamatannya dari ASEAN

bahwa Indonesia relative paling aman di seluruh Negara-negara ASEAN. Hal ini mempunyai efek positif untuk pembangunan atau pertumbuhan ekonomi.

Secara singkat, "pertumbuhan ekonomi" adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu "proses", bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan, "output per kapita". Disini jelas ada dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduk. Jadi proses kenaikan output perkapita, tidak bisa tidak. Harus dianalisa dengan jalan melihat apa yang terjadi dengan output total di satu pihak dan jumlah penduduk di pihak lain.

Aspek yang ketiga dari definisi "pertumbuhan ekonomi" adalah prespektif waktu jangka panjang. Kenaikan output per kapita selama satu atau dua tahun, yang kemudian diikuti dengan penurunan output per kapita bukan pertumbuhan ekonomi. Suatu perekonomian tumbuh apabila dalam jangka waktu yang cukup lama (10, 20, atau 50 tahun, atau bahkan lebih lama lagi) mengalami kenaikan output per kapita. Tentu saja bias terjadi bahwa pada satu tahun, output per kapita merosot (misalnya, karena kegagalan panen). Tetapi apabila selama jangka waktu yang panjang tersebut output per kapita menunjukkan kecenderungan yang jelas untuk menaik, maka kita katakan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi.

Makna perspektif jangka panjang ini bisa pula di lihat dari segi lain. Beberapa ekonom berpendapat bahwa adanya kecenderungan yang jelas untuk menaik, maka kita katakan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi. Beberapa ekonom berpendapat bahwa adanya "kecenderungan" bagi output per kapita saja tidaklah cukup. Mereka memberikan persyaratan yang lebih ketat kepada pengertian "pertumbuhan ekonomi".

Pertumbuhan ekonomi, menurut tafsiran ini dikatakan terjadi apabila ada kecenderungan (output per kapita untuk naik) yang bersumber dari proses intern perekonomian tersebut. Jadi kecenderungan tersebut, menurut persyaratan ini, haruslah berasal dari "kekuatan" yang berasal dari dalam perekonomian sendiri, bukan berasal dari luar yang bersifat sementara. Istilahnya, proses pertumbuhan ekonomi harus bersifat *self-generating*, yang berarti bahwa proses pertumbuhan itu sendiri menelorkan kekuatan atau "momentum" bagi timbulnya kelanjutan pertumbuhan tersebut dalam periode-periode selanjutnya. Persyaratan ini mungkin agak terlalu ketat. Tetapi apabila dipenuhi, maka kita bisa yakin bahwa kenaikan output per kapita tersebut akan merupakan proses jangka panjang.

Pikiran Rostow Dalam Mansoer (2001) pada dasarnya dikembangkan dalam konteks perang dingin serta membendung pengaruh sosialisme. tentang pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan sebuah versi dari teori modernisasi dan pembangunan. Yakni teori yang meyakini bahwa faktor manusia (bukan struktur dan system) menjadi fokus utama perhatian mereka.



Saling ketergantungan antara Negara yang satu dengan Negara yang lain di dunia ini merupakan realita yang harus dihadapi oleh semua Negara. Untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing maka terjalinlah suatu kerjasama di antara Negara dalam berbagai bidang kehidupan. Mengenai kerjasama internasional Koesnadi dalam Rusdi (1993 :117)mengemukakan bahwa :“Kerjasama Internasional dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan, akibat adanya hubungan interdependensi/saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional.

Keterkaitan antara perdagangan luar negeri dalam pembangunan ekonomi dan dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah dikemukakan oleh Ricardo, Smith, dan Mill dalam Rusdi (1993 : 118) sebagai berikut :

... bahwa perdagangan luar negeri dapat memberikan beberapa sumbangan yang pada akhirnya akan mampu memperlaju perkembangan ekonomi suatu Negara...keuntungan lainnya dari hubungan ekonomi dan perdangan luar negeri yaitu memungkinkan suatu Negara memperluas pasar dari hasil-hasil produknya dan memungkinkan suatu Negara tersebut menggunakan teknologi tersebut yang lebih baik keadaanya dari pada yang terdapat didalam negeri.

Perdagangan internasional merupakan suatu aspek yang penting dalam melakukan suatu kerjasama ekonomi internasional. Panglaikim dalam Rusdi (1993 :118) memberikan kejelasan tentang pentingnya perdagangan internasional :
Aktivitas kerjasama ekonomi internasional itu sendiri meliputi seluruh kegiatan perekonomian yang dilaksanakan antara Negara maupun individu dari suatu Negara dengan Negara-negara lainnya. Dua aspek penting adalah perdagangan dan investasi.

Peranan suatu Negara dalam perdagangan internasional dapat menentukan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan pendapatan suatu Negara. Hal ini tentu saja harus melalui pengaturan dan pengarahan pemerintah berupa kebijaksanaan pemerintah dibidang perdagangan luar negeri: harus tertuju pada peningkatan nilai dan volume perdagangan yang cepat sekaligus mengusahakan supaya sektor perdagangan dapat berfungsi sebagai penggerak dalam pembangunan. "Interdependensi" bidang ekonomi adalah salah satu dari kondisi dasar kehidupan internasional, tidak satupun negara dewasa ini secara ekonomi dapat berdiri sendiri – sendiri dalam rangka untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Kerja sama dalam pembangunan ekonomi dewasa ini merupakan tujuan utama setiap Negara, karena setiap Negara memiliki keterbatasan sumber daya, kemampuan administrasi dan ketrampilan teknik. Dengan demikian maka timbulnya ketergantungan antar Negara, yang berarti bahwa untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan domestik, Negara harus berintraksi dengan Negara-negara lainnya.

Modal merupakan salah satu prasyarat pertumbuhan ekonomi. Menurut Paul Krugman, dalam dalam Jatmika (2001) menggamarkan bahwa angka pertumbuhan perekonomian Asia menakjubkan sebetulnya didorong oleh masuknya modal asing. Negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia biasanya memiliki problem dasar berkenaan dengan kelangkaan modal

pembangunan Artinya, jika Indonesia ingin meraih kembali pertumbuhan ekonominya, harus berupaya menarik modal asing.

Isu penanaman modal asing dewasa ini semakin ramai dibicarakan. Hal ini mengingat bahwa untuk kelangsungan pembangunan nasional dibutuhkan banyak dana. Dana yang dibutuhkan investasi tidak mungkin dicukupi dari pemerintah dan swasta nasional. Sehingga kesenjangan tersebut dapat ditutupi dengan tabungan luar negeri. Adapun tabungan asing itu ada dua yaitu, pinjaman atau kredit dan penanaman modal langsung pada dasarnya investasi berarti suatu aktivitas ekonomi yang hasilnya baru bisa dipetik dimasa yang akan datang.

Jadi dapat dikatakan bahwa kegiatan investasi adalah suatu kegiatan yang berusaha menanamkan sejumlah modal dengan didukung oleh faktor-faktor produksi lainnya untuk memperoleh hasil yang semaksimal mungkin dimasa yang akan datang. Suatu kegiatan investasi akan memberikan kepada perusahaan tambahan hasil penjualan bila investasi ini dapat membuat perusahaan menjual produknya dalam jumlah yang besar atau memproduksi produk-produk dengan harga yang lebih murah. Dengan demikian, kegiatan investasi berusaha untuk memperoleh hasil yang lebih besar dari modal yang ditanamkan.

Menurut Swastha dalam Jatmika (2001) investasi adalah penggunaan sumber-sumber untuk menciptakan modal yang baru. Yang dimaksud dengan sumber-sumber disini adalah faktor-faktor produksi, misalnya sejumlah uang dapat dibelanjakan untuk peralatan, bangunan dan persediaan. Uang yang digunakan atau dikeluarkan untuk investasi baru tersebut akan memberikan pengaruh besar

terhadap perekonomian. Dalam kenyataan pengaruh tersebut lebih besar dibandingkan dengan jumlah uang yang dikeluarkan langsung pada investasi. Selanjutnya, **Lindert** dalam **Jatmika** (2001) mendefenisikan investasi asing sebagai suatu arus pemberi pinjaman kepada atau pembelian kepemilikan, perusahaan luar negeri yang sebagian modalnya dimiliki penduduk atau warga Negara dari warga Negara yang melakukan investasi.

Penyelenggaraan pemerintah Indonesia di dalam kerangka negara kesatuan, antara Pemerintah Pusat dan Daerah didalam pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari penggunaan beberapa asas penyelenggaraan pemerintahan (di daerah), yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Menurut asas pertama, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi terhadap kebijakan ditentukan oleh pemerintah pusat. Sementara asas kedua mempunyai banyak pengertian seperti berikut ini.

Hoogerwef dalam **Darumurti** (2003 : 10) mengemukakan bahwa :

Desentralisasi adalah sebagai pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan – badan umum yang lebih tinggi kepada badan – badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri mengambil keputusan pengaturan dan pemerintahan, serta struktur wewenang yang terjadi dari hal itu.

Lebih lanjut, mengacu pada kaidah perundang – undangan yang berlaku di negara indonesia, asas-asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terbagi dalam 3 (tiga) asas, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantu. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah



Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah. Sedangkan tugas pembantu adalah penguasaan dari Pemerintah kepada daerah dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

Pemahaman tentang istilah otonomi secara etimologinya berasal dari bahasa/kata latin "Autos" yang berarti "sendiri". Dan "Nomos" yang berarti "aturan". Berdasarkan etimologi kata otonomi ini, Danuredjo dalam Darumurti (2003 : 18) memberikan arti otonomi sebagai pengundangan sendiri, sedang Syariff dalam Darumurti memberi arti mengatur atau memerintah sendiri.. Senada dengan pendapat tersebut, Wajong dalam Darumurti (2003) mengemukakan bahwa Otonomi adalah kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah, dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan pemerintahan sendiri.

Berdasarkan seluruh uraian dan pemahaman di atas, secara garis besarnya dapat dikatakan, bahwa hadirnya satuan pemerintahan teritorial yang lebih kecil dalam wilayah negara kesatuan indonesia, yaitu Pemerintah Daerah, yang didalamnya mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya , dapat dijelaskan beberapa alasan berikut :

1. Sebagai perwujudan fungsi dan peran negara modern, yang lebih menekankan pada upaya memajukan kesejahteraan umum. Peran demikian membawa konsekwensi pada semakin luasnya campur tangan negara dalam mengatur dan mengurus aktivitas warga negara demi pencapaian tujuan negara. Fakta kemajemukan masyarakat Indonesia, baik dari segi teritorial, suku, golongan, dan agama, membawa konsekwensi kepada kompleksnya persoalan-persoalan kemasyarakatan yang harus dipecahkan oleh negara. Kenyataan ini mendorong negara untuk membuka jalur partisipasi masyarakat untuk ikut memikirkan dan menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Salah satunya, yaitu dengan memberikan keserupatan kepada satuan pemerintahan teritorial terdekat dengan rakyat, yaitu Pemerintah Daerah untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah Daerah itu diberikan kewenangan-kewenangan tertentu untuk mengatur dan mengurus aktifitas pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya.
2. Hadirnya otonomi daerah dapat pula didekati dari prespektif politik. Negara sebagai organisasi kekuasaan, yang didalamnya terdapat lingkungan-lingkungan kekuasaan, baik pada tingkat supra struktur maupun infra struktur, cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Untuk menghindari hal itu, diperlukan pemancaran kekuasaan. Pemancaran kekuasaan negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

dilakukan dengan membentuk satuan-satuan teritorial yang lebih kecil dan dekat dengan rakyat.

3. Dari perspektif manajemen pemerintahan negara modern, adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah, yaitu berupa keleluasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, merupakan perwujudan dari adanya tuntutan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan umum.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan penulis gunakan adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan investasi asing di Ambon sebelum dan sesudah konflik, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Propinsi Maluku, yang selanjutnya dikelola secara kualitatif.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang penulis temukan di lapangan secara langsung, baik dari hasil telaah pustaka maupun wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data – data hasil olahan yang disiapkan oleh berbagai lembaga yang terkait dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Telaah Pustaka, yaitu penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan topik
- b. Penelitian Lapangan, yaitu kunjungan ke beberapa instansi/badan yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu :

- Pemerintah Propinsi Maluku
- Komisi – komisi dalam DPRD Propinsi Maluku yang pembahasannya berkaitan dengan orientasi penelitian
- Lembaga Swadaya Masyarakat yang berada di Propinsi Maluku

- c. Wawancara, yaitu pengumpulan data dan informasi dari para narasumber yang mempunyai kompetensi dengan topik penelitian, yaitu :

- Gubernur Propinsi Maluku.
- Ketua atau anggota DPRD
- Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkompeten.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis yang akan peneliti gunakan adalah teknik analisa kualitatif yaitu yang bersifat deskriptifdimana. Sebagai pelengkap peneliti sertakan pula data kuantitatif yang terdiri dari angka-angka statistik, jika data-data tersebut memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional suatu Negara-bangsa timbul akibat terbatasnya sumberdaya nasional, atau kekuatan nasional, sehingga Negara-bangsa yang bersangkutan merasa perlu untuk mencari pemenuhan kepentingan nasional keluar batas-batas negaranya. Kepentingan nasional adalah meliputi kepentingan : mempertahankan kelangsungan hidup, kemerdekaan dan kedaulatan Negara, keamanan militer, politik dan ekonomi. (Tulus Warsito, 1998 : 30).

Kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/Negara atau sehubungan dengan hal yang dicitakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua Negara/bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini, yaitu keamanan dan kesejahteraan, pasti terdapat serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap Negara.

Oleh karena kesamaan itu, kepentingan nasional lazim diidentikan dengan "tujuan nasional". Namun untuk hal-hal lainnya yang bisa berbeda dan berubah dalam jangka waktu tertentu, jelas perlu diutarakan sebagai "kepentingan nasional" dan bukan "tujuan nasional". Contohnya kepentingan pembangunan ekonomi, kepentingan pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

(SDM), ekspansi dan perluasan ekspor, kepentingan merespon atau menjawab tantangan, peningkatan kekuatan militer untuk meningkatkan gengsi (prestise), kepentingan mengantisipasi dampak negatif dari globalisasi dan westernisasi, kepentingan mengundang investasi asing untuk mempercepat laju industrialisasi, kepentingan untuk mengubah atau sebaliknya untuk memelihara kondisi status-quo pada kawasan tertentu, melaksanakan peran hegemoni/pengaruhnya, dan lain sebagainya.

B. Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi bersangkut – paut dengan proses peningkatan

produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Dalam pertumbuhan ekonomi, biasanya ditelaah proses produksi yang melibatkan sejumlah jenis produksi dengan menggunakan sejumlah sarana produksi tertentu. Dalam hubungan ini. Ditunjukkan hubungan perimbangan kuantitatif antara sejumlah sarana produksi di satu pihak dengan hasil seluruh produksi di pihak lain.

Pertumbuhan ekonomi dalam arti terbatas, biasa saja berlangsung tanpa terwujudnya pembangunan. Misalnya, dalam zaman kolonial/penjajahan telah dilakukan investasi dan produksi di beberapa sektor tertentu (perkebunan, pertambangan, perdagangan luar negeri beserta lembaga-lembaga keuangan) dimana kekuasaan ekonomi dan politik seluruhnya berada pada pihak Negara penjajah. Produksi di sektor-sektor yang dikaksud memang sangat meningkat, akan

tetapi hasil produksinya untuk sebagian besar dipetik oleh golongan-golongan masyarakat di Negara penjajah. Investasi yang bersumber pada hasil produksi itu juga dilaksanakan di Negara penjajah dan diperuntukan bagi kepentingan golongan yang termasuk masyarakat penjajah. Pertumbuhan serupa itu tidak berarti peningkatan produksi yang semakin meluas di banyak dan berbagai sector ekonomi dalam masyarakat produsen sendiri.

Empat pendekatan dalam teori pertumbuhan :

1. Pendekatan Neo-Keynes

Teori Harrod

Pokok perhatian Harrod berkisar pada pertumbuhan ekonomi yang dapat berlangsung secara terus-menerus dalam pola keadaan ekuilibrium yang stabil. Dalam konstalasi ekonomi yang mana dapat dicapai dan dipertahankan ekuilibrium serupa itu dalam proses pertumbuhan ? persyaratan apa yang harus dipenuhi ataupun diciptakan agar konstalasi ekonomi yang dimaksud itu dapat berkembang ? dalam hubungan ini oleh Harrod dipaparkan dua konsep pengertian perihal laju pertumbuhan yang menjadi kunci dalam gagasannya, yaitu (1) laju pertumbuhan produksi dan pendapatan pada tingkat yang dianggap memadai dari sudut pandang para pengusaha / calon investor. (2) laju pertumbuhan produksi dan pendapatan sebagaimana itu ditentukan oleh kondisi dasar yang menyangkut (a) bertambahnya angkatan kerja karena penduduk bertambah, dan (b) meningkatnya produktivitas kerja karena kemajuan teknologi. Kondisi dasar itu

yang berkisar pada penambahan angkatan kerja dan peningkatan produktivitas kerja, sekaligus menjadi batas maksimal bagi laju pertumbuhan produksi.

2. Pendekatan Neo-Klasik

Robert M. Solow,

Sumbangan pikiran Robert Solow dan para pengikutnya dalam teori pertumbuhan mengandung manfaat besar sebagai analisis pendukung. Artinya, untuk menunjukkan dan menjaga konsistensi pada logika internal dalam karangka garis pemikiran mengenai pertumbuhan ekonomi dan mengenai interaksi intervariabel yang berlangsung dalam proses tersebut. Namun, hal itu satu sama lain kurang berarti karena kurang relevan sebagai landasan kebijaksanaan untuk memelihara pertumbuhan dalam ekuilibrium yang stabil. Dilihat dari sudut ini, kelemahan pokok dalam pandangan Neo-Klasik terletak pada serangkaian pangkal dalil yang dijadikan pangkal tolak bagi penyusunan modelnya.

Pola pemikiran Neo-Klasik didasarkan atas postulat fungsi produksi yang kontinu, persaingan bebas di pasar yang sempurna, mobilitas sarana-sarana produksi, kemungkinan substitusi di antara sarana-sarana produksi, fleksibilitas dan kelancaran pada proses penyesuaian terhadap perubahan harga-harga sarana produksi. Lagi pula tabungan dianggap identik dengan investasi. Segala sesuatu itu dijadikan perimbangan dasar bagi kesimpulan pokok Neo-Klasik seakan-akan pertumbuhan ekonomi mengandung ciri yang inheren/bersatu padu stabil dalam pola keadaan ekuilibrium/seimbang.

Akan tetapi, pangkalan-pangkalan dalil yang dimaksud di atas justru tidak sesuai, bahkan sangat jauh dari realitas dalam ekonomi masyarakat. Pangkal pikiran yang menyangkut persaingan bebas di pasar yang sempurna, mobilitas dan substitusi mengenai faktor-faktor produksi dan sebagainya, semua itu memang sesuai dengan haluan pandangan mazhab Klasik dan mazhab Neo-Klasik (I), dari Adam Smith sampai dengan John Hicks. Selain itu, dengan menganggap bahwa semua tabungan secara otomatis tersalurkan sebagai investasi sehingga dalam model Neo-Klasik tentang pertumbuhan tidak dimasukkan fungsi investasi yang terlepas dari fungsi tabungan.

Proses pertumbuhan dilihat sebagai suatu proses yang berlangsung dengan perimbangan-perimbangan yang variabel di antara faktor-faktor produksi. Dalam model yang dikembangkan oleh Solow terdapat kemungkinan untuk substitusi di antara faktor-faktor produksi oleh karena harga-harga faktor produksi bersifat fleksibel. Sehubungan dengan fleksibilitas harga faktor produksi dan substitusi di antara faktor-faktor produksi, maka kesimpulan pokok dalam analisis Solow ialah bahwa pertumbuhan mengandung ciri yang inheren stabil dalam pola keadaan ekuilibrium/seimbang.

3. Pendekatan Kaldor

Nicholas Kaldor (1908-1986)

Dalam perkembangan pemikiran Kaldor mengenai masalah pertumbuhan, perhatiannya semakin ditujukan kepada masalah-masalah konkret yang berjalan dalam masa panjang, sekitar lima puluh tahun atau lebih. Dalam hubungan ini,

Kaldor semakin meninggalkan pola pendekatan yang mengandalkan metodologi berdasarkan model-model ekonomi makro seperti telah disinggung diatas. Pandangan Kaldor tentang proses pertumbuhan jangka panjang diarahkan pada pertumbuhan sektoral yang mencakup sektor produksi komoditi primer dan sektor sekunder (industri dan konstruksi). Sedangkan, kegiatan disektor tersier (jasa-jasa) oleh Kaldor dianggap sebagai fungsi dari perkembangan industri. Pengalaman Kaldor juga dilengkapi oleh telaahan dan kajian mengenai pertumbuhan ekonomi dari sudut haluan special/regional.

Kaldor mengandakan perbedaan yang tajam antara pertumbuhan disektor produksi primer dan pertumbuhan di sektor industri. Sesuai dengan garis pemikiran Alfred Marshall dan Karl Marx, Kaldor mengamati bahwa cirri pokok dalam industri manufaktur ialah produksinya yang berlangsung dengan *increasing returns* : penerimaan imbalan per satuan produksi meningkat secara nisbi terhadap biaya per satuan produksi. Negara-negara industri sudah mempunyai landasan prasarana beserta perangkat kelembagaan yang cukup memadai. Dalam masyarakat Negara-negara itu, asas *increasing returns* berlaku baik di bidang makro (masyarakat secara menyeluruh) maupun di bidang mikro (dalam lingkungan usaha).

Increasing returns dan kemajuan teknologi adalah kait-mengait satu dengan yang lainnya. Konstruksi dan pengendalian operasional mengenai satuan modern, pembinaan keterampilan yang bersifat khas, pengembangan prosede, segala sesuatu itu memerlukan penelitian ilmiah di sertai oleh pengembangan dan penerapan hasil penelitian tersebut. Dengan begitu, *increasing returns* tidak saja memerlukan fungsi

dari skala produksi, melainkan juga dari produksi kumulatif dalam perkembangan waktu.

Hal yang sama, menurut Kaldor, berlaku mengenai akumulasi modal fisik. Peningkatan produktivitas tenaga kerja secara kontinu memerlukan investasi yang berkenaan dengan mekanisasi teknik produksi. Hal itu berarti bertambahnya modal per tenaga kerja. Pertumbuhan industri dalam jangka panjang ditandai oleh meningkatnya hasil produksi per tenaga kerja (*labor productivity*) maupun meningkatnya modal per tenaga kerja (*capital-labour ratio*). Akan tetapi, perubahan pada *capital-output ratio* (nisba modal terhadap hasil produksi) tidak begitu menonjol. Dalam hubungan ini, oleh Kaldor ditekankan lagi: investasi pada dirinya bukan menjadi sebab bagi pertumbuhan produksi, melainkan sebaliknya pertumbuhan yang memungkunkan pengarahannya.

4. Pendekatan Kuznets

Simon Kuznets (1901-1985)

Pandangan Kuznets mengenai kegiatan ekonomi masyarakat berpangkal pada kerangka perhitungan nasional (*national accounts*) dengan penjabarannya tentang unsur-unsur komponen dalam pendapatan nasional. Metodologi dalam kajian Kuznets didasarkan atas pemantauan empiris menurut pentahapan waktu dalam perkembangan keadaan. Hal itu di kenal sebagai *time series analysis*. Pemikiran teoretis di bidang ekonomi oleh Kuznets dijemakan dari ilmu deduktif menjadi ilmu kuantitatif.

Lingkup dan sifat permasalahan yang di pelajari dan di kaji oleh Kuznets maupun Kaldor untuk sebagian besar sudah melintasi garis perbatasan antara ekonomi pertumbuhan dan ekonomi pembangunan. Kedua pakar tersebut mencurahkan perhatiannya pada proses transformasi dan diversifikasi dalam kegiatan ekonomi yang ditandai oleh perubahan structural. Banyak hal dalam pemikiran Kuznets maupun Kaldor beserta hasil penelitiannya mengandung mamfaat yang besar bagi usaha pembangunan negara-negara berkembang.

Segi penting yang perlu diperhatikan di sini ialah bahwa teori-teori pertumbuhan pada umumnya memusatkan perhatiannya pada perimbangan-perimbangan keadaan yang berlaku di masyarakat Negara-negara industri yang sudah maju. Konstalasi ekonomi masyarakat di Negara-negara tersebut sudah mempunyai landasan produksi industri moderen di samping pertanian yang menggunakan teknologi moderen pula, dengan prasarana fisik, administrative, dan institusional yang memadai. Dalam perkembangan Negara seperti itu, pertumbuhan ekonomi sebenarnya sudah dan sedang berlangsung.

Di sisi lain dalam teori pertumbuhan, perhatian dipusatkan pada permasalahan yang lingkupnya dan sifatnya lebih terbatas. Telaahan dan kajian mengenai beberapa fariabel dan hubungan perimbangan antara variable-variabel itu memang bias lebih eksak. Akan tetapi, tinjauannya meliputi kurun waktu yang lebih pendek, biasanya hanya selama beberapa tahun saja. Pendekatan dalam teori dinamika mengenai pertumbuhan mungkin lebih tepat dianggap suatu analisa ekuensial.

C. Investasi

Investasi merupakan salah satu topik pembicaraan yang selalu hangat dan menarik perhatian khalayak umum. Keuntungan dan kerugian investasi merupakan pokok persoalan yang tiada habisnya. Modal merupakan salah satu persyaratan pertumbuhan ekonomi. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia biasanya memiliki problema dasar berkenaan dengan kelangkaan modal pembangunan. Artinya jika Indonesia ingin meraih kembali pertumbuhannya, harus berupaya menarik modal asing. (Jatmika, 2001 :77).

Isu investasi asing dewasa ini semakin ramai dibicarakan. Hal ini mengingat bahwa untuk kelangsungan pembangunan nasional dibutuhkan banyak dana. Dana yang dibutuhkan investasi tidak mungkin dicukupi dari pemerintah dan swasta nasional. Sehingga kesenjangan tersebut dapat ditutupi dengan tabungan luar negeri. Adapun tabungan asing itu ada dua yaitu, pinjaman atau kredit dan penanaman modal langsung. (Sicat dan HW, 1995 :49).

Pada dasarnya investasi berarti suatu aktifitas ekonomi yang hasilnya baru bisa dipetik di masa yang akan datang. Jadi dapat dikatakan bahwa kegiatan investasi adalah suatu kegiatan yang berusaha untuk menanamkan sejumlah modal dengan didukung oleh faktor-faktor produksi lainnya untuk memperoleh hasil yang semaksimal mungkin di masa yang akan datang.

Dalam investasi langsung terdapat tiga variasi :

1. Suatu perusahaan luar negeri yang 100% dimiliki oleh perusahaan dalam negeri dan bergerak sebagai perwakilan untuk perusahaan dalam negeri.

2. Suatu perusahaan di luar negeri yang dimiliki 100% oleh warga negara investor, tetapi dibentuk untuk bekerja di luar negeri.

3. Pemilikan bersama atas perusahaan di luar negeri antara warga negara investor dan warga negara asing dimana investasi dilakukan. Hal ini disebut sebagai *Join Venture*.

Pertimbangan dalam investasi langsung bagi investor :

1. Adanya jaminan keamanan
2. Fasilitas yang memudahkan transfer keuntungan ke negara asal
3. Prospek rentabilitas, tak ada beban pajak yang berlebihan
4. Adanya kemungkinan repatriasi modal (pengambil-alihan modal oleh pemerintah pusat atau daerah) atau kompensasi lain apabila keadaan memaksa
5. Adanya jaminan hukum yang mencegah kesewenang – wenganan bagi penerima investasi

Peningkatan jumlah investai asing berarti akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Strategi pengembangan investasi yang dilakukan secara berkelanjutan dan melihat keluar dengan meningkatkan pelayanan dan kemudahan uang dapat menarik para calon investor . Strategi tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Kemudahan prosedur permohonan
2. Kemudahan perjanjian
3. keringanan bidang perpajakan
4. Kemudahan Transfer modal

5. Kacamanan dan keselamatan berusaha

6. Kepastian hukum pemilik modal

Meskipun jenis-jenis atau bidang operasionalnya ada beberapa macam, tetapi hampir sebagian besar investasi asing lebih memilih bidang yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam dan pertanian. Hal ini karena barang tambang merupakan bahan mentah yang penting untuk pembangunan ekonomi negara industri. Minyak bumi dan biji tambang serta mineral lainnya adalah sasaran eksplorasi/penjelajahan dan selanjutnya dieksploitasi/dikelolah.

Selain hal tersebut di atas yang menarik minat para investor asing tersebut, juga didasarkan atas tenaga kerja yang murah, ini biasanya digunakan pada bidang manufaktur. Hal tersebut berawal dari naiknya upah tenaga kerja di negara-negara industri pada 1950-an.

D. Konflik dan Resolusi Konflik

1. Konflik

Konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat reaktif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan .berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan, dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat. Karena itu konflik tetap berguna, apalagi karena memang merupakan bagian dari keberadaan kita. Dari tingkat mikro, antar pribadi hingga tingkat kelompok, organisasi, masyarakat, dan negara, semua bentuk hubungan manusia – sosial, ekonomi dan kekuasaan mengalami pertumbuhan, perubahan, dan konflik.

Konflik dan kekerasan adalah dua hal yang berbeda, konflik, yaitu hubungan antara dua pihak atau lebih (individu dan kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki sasaran – sasaran yang tidak sejalan, sedangkan kekerasan meliputi tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial atau lingkungan, dan/atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh.(Simon Fisher Dkk, 2001 :4).

Seperti diketahui bahwa didalam masyarakat yang majemukseperti halnya di indonesia, keragaman suku, agama, ras, dan golongan (SARA) merupakan suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya konflik, bahkan ia dapat menentukan bentuk dan skala konflik. Tetapi SARA hanyalah variabel penting dari sebuah konflik. Tanpa adanya suatu faktor yang menjadi pemicu, variabel SARA tidak dapat bermain di dalam sebuah konflik.

Mencermati maraknya aksi-aksi radikal dan brutal yang terjadi di beberapa daerah di tanah air seperti yang terjadi di Maluku, Poso,Sambas, Banyuwangi, dan lain-lain, tidak dapat dikatakan bahwa faktor pemicu adalah SARA. Berdasarkan analisa, disinyalir ada faktor-faktor esensial yang sangat krusial, yang menjadi pemicu terjadinya konflik di daerah-daerah tersebut dan kemudian melahirkan gerakan radikal serta brutal di masyarakat faktor faktor itu antara lain :

1. Tumbangnya Orde Baru

Runtuhnya pemerintah Orde Baru dan munculnya pemerintahan transisi pada pertengahan mei 1998 telah menimbulkan ketidakpastian masa depan bangsa

baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial. Hal ini mengakibatkan kecemasan dan ketegangan dari sebagian masyarakat khususnya mereka yang hidupnya selama ini tergantung pada pemerintah Orde Baru. Di sisi lain, pemerintahan transisi yang dijaba oleh BJ Habibie belum mendapat legitimasi dari masyarakat, karna beliau dianggap sebagai patron atau bayang-bayang dari orde baru. Sehingga pemerintahan transisi ini dianggap semakin memperkuat ketidakpastian itu. banyak diantara mereka yang tidak hanya kehilangan pegangan (bak anak ayam kehilangan induknya), akan tetapi hidup dan masa depannya merasa terancam (tidak aman) baik fisik maupun non fisik. Hal inilah yang melahirkan monuver-monuver dari orang-orang tersebut di atas.

Pada saat itu, tekanan konflik yang terjadi di pusat pemerintah cukup hebat, dan karenanya ada usaha-usaha untuk mengurangi tekanan-tekanan di tingkat pusat itu dengan mengeksport atau mengalihkan masalah dari jakarta ke daerah-daerah, misalnya Maluku, NTT, Kupang, Sambas, dan sebagainya. Pada situasi yang demikian, entah sengaja dikondisikan atau tidak, ternyata ABRI dan pemeruntah pusat tidak mampu mengatasi masalah yang timbul di daerah-daerah secara cepat, sehingga timbul banyak korban.

2. Krisis Ekonomi

Krisis ekonomi telah memberi stimulan bagi orang-orang yang sejak awal memang telah berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan (miskin) dan orang-orang yang sedang dalam keadaan marah akibat situasi dan kondisi yang tidak menentu, untuk melampiaskan kemarahannya

3. Kesenjangan Ekonomi

1. kesenjangan ekonomi antar kaum pribumi (umumnya Islam) dan kaum non-pribumi (umumnya non-muslim).
2. kesenjangan ekonomi antara masyarakat desa dan kota.
3. kesenjangan ekonomi antar penduduk Pulau Jawa dan Luar Jawa.
4. kesenjangan ekonomi antara penduduk pendatang dan penduduk asli daerah.

Kesenjangan ekonomi yang mencolok antara masing-masing kelompok di atas telah melahirkan ketegangan yang pada akhirnya memupuk perasaan benci dan curiga antara kaum pribumi dan non-pribumi, antara masyarakat desa dan kota, antara penduduk di Pulau Jawa dan penduduk Luar Jawa, antara penduduk pendatang dan penduduk asli daerah.

Adanya korelasi antara kesenjangan ekonomi dan perbedaan SARA ini dapat menjadi faktor pemicu/stimulan bagi tumbuh dan berkembangnya aksi-aksi radikal dan brutal.

4. Diskriminasi

Terjadinya ketegangan di masyarakat yang menyulut timbulnya konflik sering kali bermula dari adanya diskriminasi. Yaitu suatu tindakan untuk memperlakukan seseorang atau sekelompok orang dengan perlakuan khusus dan berbeda yang pada hakekatnya merupakan pengingkaran hak sesama manusia untuk memperoleh perlakuan sama dan tidak berbeda. Diskriminasi ini timbul akibat kecemasan/ketakutan dari seseorang/sekelompok orang yang posisi/keberadaannya merasa terancam dengan kehadiran/masuknya pengaruh-

pengaruh asing diluar diri dan kelompoknya. Diskriminasi ini biasanya dilakukan oleh sekelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas yang dikhawatirkan dapat mengganggu soliditas yang dirasakan akan mengancam dominasi kelompok asli.

Berkembangnya istilah-istilah/penyebutan seperti : *pro status quo* (relatif menolak pembaharuan) dan *reformasi, calek muslim dan non-muslim, sekuler dan religius, presiden wanita dan non-wanita golkar dan non-golkar, pusat dan non-pusat, jawa dan luar jawa*, biasa menjadi sumber ketegangan yang serius akibat pertempuran ideologi atau . Sumber ketegangan ini berpotensi menjadi disintegrasi bila berjalan berlarut-larut, tidak efisien dan cenderung destruktif akibat konflik tidak dikelola secara memadai di masyarakat yang majemuk dan heterogen/beraneka ragam. Ketidakberdayaan dalam mengelola konflik ini berkaitan dengan masalah struktur dan kultur, yaitu tidak adanya infrastruktur yang memadai dan civil sosyeti/msyarakt madani tidak berkembang baik.

Dalam kondisi objektif, diskriminasi ini secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kebencian dan dendam diantara sesama saudara sebangsa, sehingga dalam keadaan demikian mudah sekali bagi orang-orang yang sedang dalam perlakuan diskriminasi (dipinggirkan/dimarjinalkan) untuk diprofokasi oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik sesaat.

5. Kecurigaan dan Tidak Adanya Komunikasi

Timbulnya kecurigaan ini tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan Orde Baru dalam menciptakan hegemoni yang sudah sangat menguasai pikiran rakyat ,

tatkala rezim itu runtuh rakyat dihadapkan pada sebuah keadaan yang sangat rumit dan pelik yang ditandai oleh :

a. Munculnya kesenjangan yang besar diantara wacana/diskursus resmi dengan realitas yang ada.

b. Munculnya kesenjangan antara generasi tua dan muda, antara kelompok pro status quo dan reformasi.

c. Ketiadaan forum dan media yang dikuasai oleh civil society. hal ini mengakibatkan elit yang sedang berkompetisi itu dipenuhi oleh prasangka yang hidup dan kokoh menguasai cara berfikir mereka, yang pada akhirnya mengakibatkan ketegangan. Ketegangan ini semakin meningkat karena tidak adanya komunikasi antara kelompok-kelompok yang selama ini berbeda ideologi/kesebrangan, misalnya antara Megawati dan Ahmad Sumargono, antara Adi Sasono dan Rizal Ramli

Adanya kecurigaan yang belum tentu kebenarannya ini dan diiringi dengan tidak adanya komunikasi, semakin memberikan peluang bagi terjadinya konflik yang mengarah kepada disintegrasi.

6. Pemahaman Terhadap Agama

Masalah agama (faktor internal) dan non-agama (faktor eksternal) bisa disalahgunakan untuk tujuan non-agama yang dapat menimbulkan disintegrasi. Ditinjau dari faktor internal agama, pemicu konflik biasa bermula dari rendahnya, (a) pengertian terhadap agama, (b) pengamalan agama, (c) wawasan keagamaan. Pengertian terhadap agama tanpa disertai dengan pengamalan ajaran agama dapat

menimbulkan agitasi. Rendahnya pemahaman terhadap agama berpengaruh terhadap perilaku seseorang dalam kehidupan sosial yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik.

Faktor eksternal yang sering mempengaruhi agama adalah masalah politik. Ketika ada faktor pemicu masuk dan menemukan momentumnya, maka faktor SARA terutama agama bisa dipakai sebagai alat untuk mempertajam konflik. Dengan kata lain ada faktor non-agama yang diagamakan. Selain itu, adanya penyempitan nilai agama untuk politik temporer yang kurang memberikan nilai agama yang luhur di tengah masyarakat, berpotensi melahirkan konflik.

7. Masala Pemerintah

Selama ini pemerintahan Orde Baru dinilai tidak atau kurang bersikap adil kepada rakyat/ golongan. Sebaliknya ia melakukan praktek-praktek diskriminasi kepada orang/golongan yang pada akhirnya melahirkan kecemburuan baik di bidang sosial, politik, maupun ekonomi. Sikap Orde Baru juga cenderung membungkam, memarjinalisasi, mendevaluasi semua hala yang berhubungan dengan politik aliaran/massa.

Kelihaian pemerintah Orde Baru didalam menciptakan hegmoni (yaitu, rakyat dibuat percaya/diyakinkan bahwa gagasan yang ditawarkan pemerintah itu mengandung kebenaran) dan penggunaan kekerasan untuk melanggengkan dominasi kekuasaan yang berlangsung cukup lama, telah menimbulkan ketegangan di masyarakat yang berpotensi melahirkan disintegrasi

2. Resolusi Konflik

Konflik dapat dihadapi dengan tiga cara, yaitu :

- a. bersifat tidak acuh terhadapnya
- b. menekannya
- c. menyelesaikannya

sikap tidak acuh berarti bahwa tidak adanya upaya langsung untuk menghadapi sebuah konflik yang telah termanifestasi. Maka dalam keadaan demikian, konflik dibiarkan berkembang menjadi sebuah kekuatan destruktif atau sebuah kekuatan konstruktif.

Menekan sebuah konflik yang terjadi, menyebabkan menyusutnya dampak yang negatif, tetapi ia tidak mengatasi , ataupun meniadakan pokok-pokok penyebab timbulnya konflik tersebut.

E. Konsep Otonomi Daerah

Pada umumnya kita menghubungkan otonomi daerah yang mengandung pelimpahan wewenang (dekonsentrasi) dan penyerahan urusan (desentralisasi) kepada daerah, adalah dalam rangka demokratisasi (politik) dan peningkatan pembangunan nasional di daerah. Tentang bagaimana pembangunan dilaksanakan berdasarkan persepsi dan kehendak mereka (ekonomi politik). Namun untuk masa depan, otonomi daerah harus lebih didasarkan pada kemampuan fisik, suatu kemampuan membiayai dirinya sendiri untuk menyelenggarakan otonomi, karena tanpa itu otonomi tidak mungkin terselenggarakan.



Berdasarkan pemahaman bahwa keanekaragaman istilah sistem otonomi dipergunakan untuk maksud yang sama, maka dapat dikemukakan guna keperluan acuan pengertian dari sistem otonomi, yakni patokan tentang cara penentuan batas – batas urusan rumah tangga daerah.

Pada umumnya dikenal 2 (dua) sistem otonomi yang pokok, yaitu :

1. Sistem otonomi materil, atau pengertian rumah tangga materil

Dalam pengertian sistem otonomi materil, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ada pembagian tugas (wewenang dan tanggungjawab) yang eksplisit (diperinci dengan tegas) dalam undang-undang pembentukan daerah. Artinya, otonomi daerah itu hanya meliputi tugas-tugas yang telah ditentukan satu per Satu, jadi bersifat definitive/pasti. Hal itu berarti pula, apa yang tidak tercantum dalam undang-undang pembentukan daerah, tidak termasuk urusan pemerintah daerah otonom , tetapi urusan pemerintah pusat.

Cara penentuan tersebut diatas didasarkan pada keyakinan bahwa ada perbedaan tugas yang asasi dalam menjalankan usaha-usaha memajukan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat antara negara dan daerah-daerah otonomi yang lebih kecil. Di sini yang berbeda ialah materi yang menjadi objekpengurusan dan pengaturan dari masyarakat hukum masing-masing tersebut diatas. Oleh karena itulah, pengertian ini disebut sebagai sistem otonomi materil.

2. Sistem Otonomi Formil, atau pengertian Rumah Tangga Formil

Didalam pengertian sistem otonomi formil, tidak ada perbedaan sifat antara urusan-urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan oleh daerah-daerah

otonom. Hal ini berarti apa yang dapat dilakukan oleh negara (pemerintah pusat), pada prinsipnya dapat pula dilakukan oleh daerah-daerah otonom.

Bila ada pembagian tugas (wewenang dan tanggungjawab), hal itu semata-mata disebabkan pertimbangan – pertimbangan yang rasional dan praktis, seperti efisiensi penyelenggaraan tugas pelayanan publik. Artinya, pembagian tugas itu tidaklah disebabkan materi yang diatur berbeda sifatnya, tetapi adanya keyakinan bahwa kepentingan daerah-daerah dapat lebih baik dan berhasil (lebih efisien) apabila diselenggarakan sendiri oleh daerah-daerah itu masing-masing daripada oleh pemerintah pusat.

Dalam sistem otonomi formil yang demikian tadi, maka tidak terdapat perbedaan sifat materi yang diurus oleh daerah-daerah sebagai masyarakat hukum yang lebih kecil dan negara sebagai masyarakat hukum yang lebih besar. Perbedaan tugas diadakan secara formil dengan membuat bentuk-bentuk peraturan tertentu. Demikian pula, dalam sistem otonomi formil tidaklah secara apriori/tidak pasti ditetapkan apa yang termasuk rumah tangga daerah otonom. Tugas dari daerah otonom secara normatif tidak terperinci di dalam undang-undang pembentukannya, tetapi ditentukan dalam suatu rumusan yang umum saja. Rumusan umum itu hanya mengandung asas-asas saja. Sedangkan pengaturan yang lebih lanjut diserahkan kepada pemerintah daerah. Batasannya tidak ditentukan secara pasti, tetapi bergantung dari keadaan, waktu dan tempat.

Disamping itu, ada juga sistem lain yang merupakan kompromi antara kedua sistem itu, yaitu :

3. Sistem otonomi rill, atau pengertian rumah tangga rill

Otonomi nyata adalah pemberian otonomi kepada daerah, haruslah didasarkan pada faktor-faktor. Perhitungan – perhitungan, tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangga sendiri..

Dalam sistem ini penyerahan urusan atau tugas dan kewenangan kepada daerah didasarkan pada faktor yang nyata atau rill, sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan yang rill dari daerah maupun pemerintah pusat serta pertumbuhan masyarakat yang terjadi.

Oleh karena pemberian tugas dan kewajiban serta wewenang ini didasarkan pada keadaan yang rill di dalam masyarakat, membawa konsekwensi bahwa tugas/urusan yang selama ini menjadi wewenang pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat daerah untuk mengaturnya dan mengurusnya sendiri. Sebaliknya, tugas yang telah menjadi wewenang daerah pada suatu ketika, bila mana dipandang perlu, dapat ditarik kembali oleh pemerintah pusat.

Sistem ini merupakan jalan tengah atau percampuran dari sistem otonomi materil dan formil. Dalam arti, sistem ini mengandung anasir-anasir, baik dari sistem otonomi materil maupun sistem otonomi formil, sehingga dapat dikatakan merupakan sistem tsendiri. (Umbu, 2003 : 22).

Otonomi bertanggungjawab adalah pemberian otonomi benar-benar sejalan dengan tujuannya, yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh

pelosok negara dan serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa, menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sejalan dengan pengertian diatas, maka sebaiknya acuan bagi penilaian otonomi adalah sebagai berikut :

1. harus serasi dengan wawasan nusantara, sesuai dengan pembinaan persatuan dan kesatuan negara. Tidak boleh timbul fanstisme daerah dan primordialisme.
2. Terikat dalam negara kesatuan, sehingga keserasian pusat dan daerah harus dijaga, otonomi tidak boleh dianggap menambah besarnya kekuasaan daerah.
3. harus menjamin perkembangan dan pembangunan daerah, namun tetap menjadi bagian integral dari pembngunan nasional. Oleh karena itu pendekatan pembangunan dilakukan melalui pendekatan desentralisasi (mewakili aspirasi daerah) dan dekonsentrasi (mewakili aspirasi nasional).
4. harus mempunyai kemampuan keuangan untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan daerah yang otonom.

Secara umum terdapat dua jenis pemerintah daerah yang umumnya ditemui di berbagai negara, yaitu pemerintahan *local administrative* atau *local state government*. Lokal state government umumnya diterjemahkan sebagai pemerintahan wilayah, dimana proses terbentuknya merupakan konsekwensi dari penerapan asas dekonsentrasi. Adnya pemerintahan wilayah administrative dan pemerintahan local administrative adalah sebagai wakil dari pemerintahan pusat atau national government. Jadi, local state government atau pemerintah local administrative bertugas hanya menyelenggarakan perintah – perintah dan petunjuk

- petunjuk dari pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah, seringkali disebut pemerintah local pusat. Juga oleh karena menyangkut nama pemerintah pusat atau pemerintah negara, seringkali disebut juga pemerintah negara setempat.

Denagan undang - undang, suatu daerah dibentuk dan ditetapkan kewenangannya. Selanjutnya, dengan undang - undang pula suatu daerah dapat dipecahkan menjadi beberapa daerah dan beberap daerah disatukan menjadi satu daerah. Undang - undang memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, misalnya hak untuk mempunyai sumber penghasilan sendiri, yaitu dengan memungut pajak dan retribusi

Keperluan adanya otonomi dalam negara dilatarbelakangi oleh pengalaman masa lalu, dimana keberadaan negara hanya dianggap sebagai instrumen belaka dari kaum kapitalis. Kondisi ini kemudian melahirkan konsep *marx* tentang instrumental state. Demikian halnya negara - negara sosialis yang menghendaki adanya otonomi penuh dari pengaruh partai politik (partai komunis) yang cenderung mengintervensi kehidupan negara. Dalam hubungan ini, negara menghendaki otonomi untuk memperkecil dan bahkan menghilangkan pengaruh - pengaruh maupun intervensi kaum kpitalis dan sosialis.

Berbeda halnya dengan keperluan otonomi dalam pemerintahan local, yaitu untuk mempebesar kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Karena itu , keperluan otonomi pada tingkat lokal pada hakikatnya adalah untuk mempekecil intervensi pemerintah pusat dalam urusan rumah tangga daerah. Dalam rangka kesatuan otonomi daerah ini diberikan pemerintah pusat., sedangkan pemerintah daerah hanya menerima penyerahan dari pemerintah pusat.



BAB III

TINJAUAN UMUM

A. Gambaran Umum Lokasi

1. Keadaan Geografi

Sesuai SK Gubernur No. 288 Tahun 2002, maka secara administrasi Propinsi Maluku terbagi atas 5 (lima) Kabupaten/Kota, 42 Kecamatan dan 875 Desa, yang sebelumnya hanya 29 Kecamatan dan 840 Desa /Kelurahan. Luas wilayah Propinsi Maluku secara keseluruhan adalah 581,376 km², terdiri dari luas lautan 527.191 km² dan luas daratn 54.185 km². Dengan kata lain sekitar 90 persen Wilayah Propinsi Maluku adalah lautan.

Propinsi Maluku merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari 559 pulau dan dari sejumlah pulau tersebut, terdapat beberapa pulau yang tergolong pulau besar. Daratan Propinsi Maluku tidak lepas dari gugusan gunung dan danau yang terdapat hampir di seluruh Kabupaten/Kota. Yang berjumlah 4 (empat) gunung dan 11 (sebelas) danau.

2. Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk dari tahun 1971 sampai dengan tahun 2000, jumlah penduduk propinsi maluku terus mengalami penambahan. Pertambahan Penduduk meningkat cukup besarpada periode sensus 1980-1990 atau dengan kata lain bertambah sebesar 259.921 jiwa atau 28,94 persen selama sepuluh tahun. Namun pada decade 1990-2000 pertambahan sangat rendah yaitu enam kali

lebih rendah dibandingkan dekade sebelumnya yang hanya bertambah sekitar 42.189 jiwa atau 3,64 persen selama sepuluh tahun terakhir ini. Bila dilihat menurut daerah Kabupaten/Kota, terlihat turunya presentase pertambahan penduduk ini terjadi hanya di kota Ambon yaitu sebesar 25,54 persen. Jumlah Penduduk Propinsi Maluku sesuai hasil SP2000, tercatat sebesar 1.200.067 jiwa dan pada tahun 2003 ini berdasarkan hasil registrasi penduduk jumlah penduduk sudah bertambah menjadi 1.288.813 jiwa.

Pertambahan penduduk pada tahun 2003 cukup besar disbanding tahun sebelumnya dengan angka pertumbuhan sebesar 2,41 persen. Hal ini karna kondisi keamanan di daerah ini sudah mulai kondusif mengakibatkan arus masuk penduduk menjadi bertambah. Walaupun demikian secara trend laju pertumbuhan penduduk terus menurun. Terutama pada dekade 1990-2000 penurunannya cukup tajam yaitu mencapai 0,37 persen. Namun pada periode 2000-2003 pertumbuhan cukup tinggi.

Angka pertumbuhan penduduk antara Kabupaten/Kota sangat bervariasi. Laju pertumbuhan Kabupaten Maluku Barat dan Maluku Tenggara mengalami penurunan selama Tahun 2000-2003. sementara Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru dan Kota Ambon, laju pertumbuhannya meningkat bahkan cukup tajam untuk Kota Ambon yaitu mencapai 5,90 persen. Penyebaran penduduk di Propensi Maluku sangat tidak merata, berdasarkan hasil registrasi penduduk 2003 persentase penduduk Kabupaten Maluku Tengah tercatat lebih tinggi dibanding Kabupaten yang lain yaitu 42,73 persen sementara Kabupaten Buru hanya mencapai 10,22 persen

3. Angkatan Kerja

Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk mengetahui keadaan ekonomi penduduk adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Ukuran ini biasanya digunakan untuk mengetahui persediaan tenaga kerja. Gambaran TPAK di Propinsi Maluku selama 5 tahun terakhir terus meningkat. Pada tahun 1999, TPAK sudah mencapai 50,44 persen kemudian mengalami penurunan menjadi 44,44 persen pada tahun 2001 dan meningkat cukup tajam pada tahun 2002 menjadi 70,42 persen. Dengan kondisi daerah yang mulai membaik, angka TPAK 2003 turun menjadi 54,00 persen. TPAK untuk daerah Kabupaten/Kota bervariasi, 3 Kabupaten/Kota yang memiliki TPAK dibawah angka Propinsi yaitu Kabupaten Maluku Tengah 50,28 persen. Sementara TPAK Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Tenggara diatas angka Propinsi yaitu 62,71 persen, 73,74 persen dan 61,05 persen.

Selanjutnya ada diamati kegiatan penduduk usia kerja (10 tahun keatas) baik Kelompok Angkatan Kerja maupun Bukan Angkatan Kerja, proporsi kedua kelompok ini cukup berbeda dengan perbandingan 54,00 persen dan 46,00 persen. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya proporsinya bergeser. Menjadi Angkatan Kerja lebih besar dibandingkan Bukan Angkatan Kerja. Namun pada tahun 1998 dan 1999 Proporsi Angkatan Kerja jauh lebih dominan dari bukan angkatan kerja.

Komposisi penduduk laki-laki dan perempuan menurut kegiatan utamanya. Terlihat bahwa pekerja laki-laki lebih besar dari pada pekerja perempuan yaitu

65,64 persen dengan 34,45 persen. Hal ini karena perempuan lebih banyak mengurus rumah tangga daripada laki-laki. Selain itu ratio atau yang disebut tingkat kesempatan kerja (TKK) di propinsi Maluku mencapai 84,57 persen, dengan perbandingan laki-laki 91,42 persen dan perempuan 71,53 persen.

4. Potensi Sumber Daya Alam

A. Potensi Sumber Daya Perairan

Perairan Maluku dengan luas wilayah sebesar 765.272 Km² merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup potensial, dimana berdasarkan hasil survey potensi tersebut diperkirakan sedianya stock perikanan di perairan Maluku sebesar 2,4 juta ton/tahun, dengan potensi yang dapat dimanfaatkan setiap tahunnya adalah sebesar 50 persen atau 1,2 juta ton. Selain potensi ikan tuna, perairan maluku juga memiliki potensi perikanan lainnya seperti jenis-jenis ikan demersal, ikan katrang, rumput laut, Molusca, Sirip ekeor ikan hiu, Mutiara, udang serta jenis-jenis lainnya.

B. Potensi Lahan

Luas lahan Propinsi Maluku adalah 8,57 juta hektar dengan perincian seperti dibawah ini :

1. Luas Kawasan Hutan (TGHK)	: 5.693.900	Ha
2. Potensi Hutan Lestari	: 1.633.528	Ha
3. Potesi Untuk Tanaman Pangan	: 2.958.214	Ha
4. Potensi Untuk Perkebunan	: 2.281.382	Ha
5. Padang Rumput (Ternak)	: 177.473	Ha

C. Pertambangan

Propinsi Maluku Memiliki Potensi Tambang baik dalam Tahap eksplorasi maupun yang telah dieksploitasi, jenis-jenis tambang yang cukup potensial antara lain seperti Nikel, Belerang, Mangan, Minyak dan Gas, Emas, Perak, Barite, Marcuri, Batu Apung, Batu Permata, Batu Gamping, Marmer, Garnit serta Pasir Kuarsa.

D. Energi

Mengenai energi dapat dikatakan bahwa konsumsi energi di Maluku berasal dari energi komersial Minyak Bumi dan non komersial terutama untuk konsumsi masyarakat desa.

Gambaran mengenai kemungkinan pemamfaatan potensi sumber-sumber energi di Maluku adalah sebagai berikut :

1. Tenaga Air : beberapa pulau sedang dan besar di Maluku memiliki sungai air terjun dengan perkiraan sumber daya sebesar 400 MW dapat digunakan sebagai pembangkit tenaga Mikro.
2. Panas Bumi : disini banyak terdapat sumber-sumber air panas baik di pulau-pulau besar, sedang maupun kecil. Sumber panas bumi antara lain terdapat di Jailolo dengan Reserve Value 50 – 250 MW, di Bacan Reserve Value 50 – 250 MW dan di pulau Ambon 50 MW.
3. Panas Matahari : untuk jangka panjang, sumber energi ini merupakan sumber yang tidak terbatas dan tidak berdampak polusi. Propensi Maluku terletak di daerah tropic sehingga tenaga Matahari dapat di mamfaatkan

untuk berbagai keperluan seperti pertanian tenaga listrik, tenaga mekanis, biologi dan kimia.

4. Tenaga Angin : terutama di Maluku Tenggara.
5. Air Laut : sama seperti tenaga matahari, sumber ini cukup melimpah dan tidak terbatas yaitu dengan menggunakan perbedaan temperature antara permukaan air laut dan dasar untuk pembangkit tenaga listrik.
6. Kayu Bakar : merupakan sumber utama bagi masyarakat sekitar daerah kota.

E. Pariwisata

Propinsi Maluku yang terlatak pada Garis Wallace dan secara etnologis berda di titik simpang etnis Melanesia/Polinesia dengan Austronesia serta berada pula pada titik simpang geologis Circum Pasifik dan Mediterania telah menyebabkan Wilayah ini memiliki potensi Alam yang khas. Cirri khas potensi Alam Maluku antara lain pulau-pulau dengan coral, pulau-pulau Vulcanis yang berpasir hitam, taman-taman laut yang hampir terdapat pada semua pulau dengan beraneka ragam jenis biota laut seperti karang-karang, siput, mutiara, lilia dan henras laut.

Dengan potensi sumber daya laut yang kaya dan fauna khas seperti kanguru, biawak, berbagai burung cendrawasi, kakatua putih dan hitam, nuri, serta berbagai jenis insektat lainnya dan flora yang khas seperti cengkeh, pala, yang membuat sejarah dunia dengan sisa-sisa peninggalanya seperti cengkih AFO yang tertua di dunia dapat menjadi saksi hidup perjalanan sejarah tersebut. Di samping itu

perbedaan Maluku yang telah di bentuk oleh alam, letak geografis dan historis, juga melahirkan ciri khas penduduk Maluku yang terbuka, spontan, rama tamah, keras dan ulet, penuh fighting spirit, bergotong royong secara kekeluargaan atas dasar hukum PELA. Dengan demikian propinsi Maluku yang kaya akan objek wisata dan budaya, unik bukan saja menarik bagi para wisatawan yang bertujuan untuk rekreasi/berlibur namun juga menarik bagi wisatawan minat khusus, atau wisata ilmiah dan wisata dagang. Berbagai objek wisata di Maluku dapat di katagorikan sebagai berikut : Objek wisata pantai, wisata taman laut, wisata bahari, wisata benteng, wisata sejarah, wisata istana dan tempat peribadatan, wisata alam serta wisata kawasan konservasi.

5. Transportasi

Mengingat kondisi geografis di Wilayah Maluku memiliki luas lautan lebih besar dari daratan, sehingga hubungan antar pulau di Propinsi Maluku lebih banyak menggunakan sarana angkutan laut. Sementara sarana angkutan darat dan udara juga tak kalah pentingnya. Prasarana angkutan laut yang ada di Propinsi Maluku tercatat ada 27 buah pelabuhan umum dan 22 pelabuhan khusus. Prasarana angkutan darat pada tahun 2000 tercatat 1.475,44 km, terdiri dari jalan Nasional sepanjang 251,33 km, jalan propinsi sepanjang 1.224,11 km. Prasarana angkutan udara pada tahun 1999 tercatat ada 11 buah pelabuhan udara.

B. Propinsi Maluku Pada Masa Damai

Realitas kondisi masyarakat Maluku saat ini tidak terlepas dari perjalanan sejarah suku bangsa Maluku baik secara berdiri sendiri maupun sebagai bagian dari himpunan suku bangsa yang mendiami kawasan nusantara yang setelah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dinamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

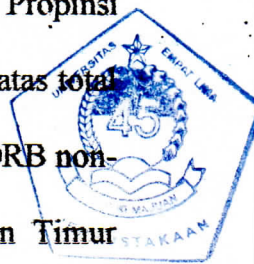
Sejarah peradaban masyarakat Maluku mulai tercatat sejak abad pertengahan, ketika para pedagang bangsa Arab melalui Cina melakukan perjalanan ke Kesultanan di Maluku Utara terus ke Selatan. Sambil melakukan perdagangan rempah-rempah, mereka juga menyebarkan agama Islam. Secara struktur, Islam mulai masuk ke Maluku pada abad ke 13 melalui pengislaman terhadap masyarakat pesisir yang dalam prespektif budaya Maluku sebagian besar disebut sebagai kelompok masyarakat Uli/Pata Lima. Sedangkan kelompok masyarakat Uli/Pata Siwa yang pada umumnya mendiami wilayah pegunungan / pedalaman tetap memperahankan kepercayaan leluhur / animisme karma ada pandangan bahwa keselamatan hidup di dunia hanya dapat dicapai melalui upaya keseimbangan hidup dan itu berarti harus selalu ada peradaban. Kelompok masyarakat Uli / Pata Siwa kemudian memeluk agama Kristen Katolik yang dibawah oleh Portugis yang mulai masuk ke Maluku pada awal abad ke 16, dan mulai menyebarkan agama Kristen Katolik pada pertengahan abad ke 16 melalui kehadiran Fransiscus Xaverius. Ketika itu masyarakat Uli / Pata Lima adalah organisasi social yang berafiliasi

dengan Kerajaan Ternate. Sedangkan masyarakat Uli / Pata Siwa berafiliasi dengan Kerajaan Tidore

Kehadiran pedagang bangsa Arab, Portugis, Belanda disertai masuknya agama Islam dan Kristen di Maluku Utara pada awalnya karena ada keinginan untuk menguasai perdagangan rempah – rempah (pala dan cengkih) yang pada waktu itu sangat diperlukan untuk bahan obat-obatan dan bahan pemanas di Eropa dan Afrika. Keinginan penguasaan rempah – rempah itu pula yang kemudian menimbulkan keinginan Portugis dan kemudian Belanda untuk melakukan Kristenisasi di Maluku terhadap penduduk pesisir yang pada umumnya telah lebih dulu memeluk agama Islam. Fakta sejarah menunjukkan bahwa karena itu pula terjadi beberapa kali perang besar yang kesemuanya bernuansa agama kecuali perang Pattimura (1817). Perang besar tersebut antara lain Perang Hitu (1520 – 1605), Perang Banda (1609 – 1621), Perang Huamual (1625 – 1656), Perang Alaka (1625 – 1637), Perang Wawanw (1633 – 1643), Perang Kapaha (1636 – 1646), dan Perang Iha (1632 – 1651). Dengan demikian sejarah juga mencatat bahwa konflik bernuansa agama bukan hal baru di Maluku, sama seperti yang sekarang terjadi di Maluku. Sejarah mencatat kehidupan masyarakat Maluku sejak abad ke 16 telah dilibatkan dalam pertikaian yang kemudian melahirkan segregasi pemukiman di Maluku (Samy Titaley, 2002 : 28). Karena itu pula para leluhur suku bangsa Maluku dalam upaya memelihara kekerabatan antar sesama anak suku bangsa Maluku melahirkan, menumbuhkan dan memfatalkan budaya Maluku (Suadi Marasabessy, 25 : 2002)

Dilihat dari segi historis Maluku merupakan daerah yang sangat potensial baik sumber daya alamnya maupun geostrateginya. Hal ini tentunya perlu dibanggakan dan dijaga, karna potensi itu nantinya akan dikelola untuk kepentingan perekonomian daerah Maluku itu sendiri.

Mengenai pertumbuhan ekonomi, jika dilihat dari pertumbuhan rata-rata PDRB pada dua priode maka terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi maluku secara keseluruhan telah menurun yaitu rata-rata 8,9 peresen (untuk non migas) pada periode 1983-1988 menjadi 7,7 persen (7,9 untuk non migas) per tahun pada periode 1988-1991. hal ini berbeda dengan pertumbuhan PDRB di Propinsi kepulauan timur Indonesia mupun wilayah KTI, KBI dan Indonesia secara keseluruhan yang terlihat adanya peningkatan. Untuk wilayah kepulauan timur terjadi peningkatan pertumbuhan PDRB pada periode yang sama dari 5,0 persen (6,6 non migas) menjadi 8,2 persen (8,3 non migas), menjadi 7,0 persen (7,6 non migas) dan indonesei meningkat dari 6,4 persen (7,2 persen non migas) menjadi 6,9 persen (7,7 persen non-migas) rata-rata per tahun periode yang sama. Sedangkan dilihat dari PDRB per kapita pada tahun 1991, maka PDRB per kapita Propinsi Maluku (Rp. 914 ribu dan Rp.907 ribu untuk PDRB non-migas) masih diatas total wilayah kepulauan timur yang sebesar RP. 655 ribu (Rp.612 ribu untuk PDRB non-migas). Sedangkan jika dibandingkan dengan daerah lain di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Indonesia secara keseluruhan maka PDRB per kapita Maluku masih lebih kecil lagi yaitu Rp. 1.086 ribu untuk KTI (Rp.853 ribu untuk non-migas) dan Rp.1.197 ribu (1.017 ribu untuk non-migas) untuk Indonesia dan



bahkan jauh lebih kecil dibandingkan dengan KBI yaitu Rp.1222 ribu (Rp. 1054 ribu untuk non-migas). (Jhon Pieris, 46 : 2004)

Pertumbuhan ekonomi daerah Maluku selama kurun waktu 1995 – 1997 rata-rata sebesar 5,69 persen dimana laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara adalah yang tertinggi yaitu rata-rata 12,16 persen, dan yang terendah yaitu Maluku Tenggara sebesar 3,46 persen, sedangkan Maluku Utara 4,28 persen, Maluku Tengah 4,99 persen, Halmahera Tengah 7,22 persen, Kodya Ambon 8,43 persen.

Pendapatan masyarakat di daerah ini meningkat dari tahun ke tahun, apabila pada tahun 1995 pendapatan masyarakat mencapai sebesar Rp. 1.339.620,-maka pada tahun 1997 telah meningkat menjadi Rp.1.598.144. (BKPMMD Prop. Maluku, 8 : 1999)

Jenis industri yang ada di Maluku dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kelompok yaitu :

1. Aneka Industri
2. Industri Kimia Dasar
3. Industri Kecil

Perkembangan sektor industri ini di Maluku berupa jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja serta nilai investasi yang diserap selama kurun waktu 1993 sampai dengan 1997 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**JUMLAH UNIT USAHA, PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN
INVESTASI SELAMA PELITA V TAHUN 1993 S/D 1997**

NO	KLASIFIKASI	UNIT USAHA	TENAGA KERJA (ORANG)	INVESTASI (Milyar Rp)
1	2	3	4	5
1	Angka Industri			
	Thn. 1993	1.194	6.474	6.456
	Thn. 1997	1.032	6.833	15.180
2	Industri Mesin			
	Thn. 1993	1.908	21.401	984.186
	Thn. 1997	2.067	23.737	3.181.584
3	Industri Kecil			
	Thn. 1993	6.137	33.139	6.190
	Thn. 1997	2.552	7.868	2.909

Sumber : Kanwil Perindustrian Prop Maluku

C. Propinsi Maluku Pada Masa Konflik Hingga Sekarang

Tepat pada tanggal 19-20 Januari 1999, konflik berdarah Ambon mulai. Konflik ini bukan hanya merebah, melainkan meluas menyebar ke seluruh kepulauan Maluku. Sesuatu yang mengerikan, yang dalam sejarah Republik belum pernah terjadi, menjadi kenyataan; orang Kristen membunuh orang Muslim dan orang Muslim membunuh orang Kristen. Bagi masyarakat yang bersangkutan, perang saudara itu mau di sebut bagaimana , suatu malapetaka tanpa tara. Ribuan orang mati dan terluka, lebih dari seratus ribu pengungsi, kota-kota dan kampung-kampung hancur, dasar ekonomi pun hancur.

Ratusan Tahun lamanya orang-orang Maluku yang memang berjiwa prajurit dapat me-manage kehidupan bersama dengan cukup damai. Sekarang hubungan social itu hancur. Diganti oleh nihilisme kebencian dan emosi dendam.

Sekarang konflik Maluku mengancam eksistensi bangsa. Emosi-emosi dalam masyarakat-yang mendengar bahwa saudara-saudara mereka dibantai-bantai sulit ditahan. Kalau konflik terus merambat dari Ambon ke Seram, ke Maluku Selatan, ke Ternate, ke Buru, ke Halmahera, ke seluruh kepulauan Maluku, sampai meluap ke propinsi-propinsi lain akan terjadi situasi Nasional yang kemungkinannya itdak dapat lagi ditangani oleh pemerintah nasional.

Siapun dia, apabila dengan cermat mendengar dan membaca berita tentang konflik Maluku dan Maluku Utara, apalagi yang pernah kesana pasca kerusuhan pasti tidak percaya, dan didalam lubuk hatinya yang paling dalam mengatakan Maluku telah hancur, Ambon bukan lagi Ambon Manise tapi Ambon hangus. Maluku yang terkenal dengan seribu pulau itu bukan lagi daerah "Simbol kerukunan" antar umat beragama, tapi sebaliknya berubah menjadi daerah "symbol perpecahaan" antar umat beragama. Kini tersisa, puing-puing gedung yang hangus terbakar, ribuan pengungsi yang menderita kelaparan, kondisi kesehatan yang buruk, dan trauma psikologi yang mereka alami. Dan yang paling parah adalah yang menjadikan konflik berkepanjangan yaitu masing-masing kelompok mamakai nama "agama" sebagai alas an untuk berperang.

Konflik Maluku yang telah menyebabkan hancurnya berbagai tatanan kehidupan masyarakat Maluku akan memasuki Tahun keempat. Satu usia konflik

yang begitu lama dibandingkan dengan usia konflik sejenis yang pernah terjadi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena usianya yang begitu lama maka konflik Maluku pernah meliputi wilayah konflik yang begitu luas (bahkan meliputi Propinsi Maluku Utara), melibatkan pelaku konflik yang begitu banyak dan menyebabkan korban konflik yang begitu besar. Hasil penelitian dan perbandingan oleh Lembaga Swadaya (LSM) Baku Bae menunjukkan bahwa korban konflik Maluku empat kali lebih besar daripada korban konflik Aceh yang terjadi selama 23 Tahun. Satu julumlah yang sangat spektakuler karena justru terjadi dalam situasi kehidupan kontemporer bangsa dan Negara Indonesia serta dilakukan sendiri oleh antar sesama anak suku bangsa Maluku. Bahkan bila dibandingkan dengan konflik sejenis yang terjadi di Poso dan Maluku Utara, Konflik Maluku lebih kompleks dan dengan demikian diperkirakan akan lebih lama dan lebih sulit diselesaikan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan Konflik Maluku. Dilakukan di tingkat lokal maupun di tingkat nasional ; oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Terakhir atas mediasi dan fasilitasi dari Menkokesra Maluku di Malino. Walaupun kesepakatan itu merupakan hasil kompromi dari perwakilan dua komunitas yang selama ini saling berhadapan di Maluku (Islam – Kristen) tetapi sampai ini hari masih saja terjadi konflik secara sporadic pada tempat dan waktu tertentu. Dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang sampai sekarang belum teridentifikasi. Dan tentu saja menimbulkan korban yang terus berjatuhan dalam jumlah yang tidak sedikit. Fakta ini menunjukkan bahwa potensi Konflik masih tetap ada di Maluku.

Kondisi dan situasi ini secara otomatis sangatlah berpengaruh terhadap pembangunan dan pertumbuhan di berbagai sektor, terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Akibat serta dampak konflik yang terjadi adalah hancurnya infra struktur-infra struktur ekonomi, pusat pusat perdagangan dan industri yang menjadi sumber pendapatan asli daerah tidak berjalan efektif dan sebagiannya menjadi tempat yang rawan dan menyeramkan.

Menurut Bambang B. Soetjipto, Pembangunan ekonomi yang selama ini telah menghasilkan pertumbuhan yang tinggi ternyata belum sepenuhnya dapat mengatasi masalah kesenjangan antar daerah. Selama pembangunan jangka panjang tahap I, perkembangan ekonomi antar daerah memperlihatkan bahwa Propinsi-Propinsi di Pulau Jawa pada umumnya mengalami perkembangan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan Propinsi di luar Jawa. Perbedaan perkembangan antar daerah tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan kesejahteraan dan kemajuan antar daerah. Ini dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi dan sosial di kawasan tersebut : pada tahun 1991 distribusi Produk Domestik Regional Bruto untuk KTI masih relative kecil yaitu 16,5 persen dibandingkan KBI (Kawasan Barat Indonesia) yang besarnya 83,5 persen. Dari total distribusi KTI sebesar 16,5 persen tersebut, sembangan Propinsi Maluku sebesar 0,8 persen. (Pieris, 46 : 2004)

Jika dilihat dari sisi perekonomian, laju pertumbuhan ekonomi di Propinsi Maluku pada tahun 2000 tercatat sekitar 15,33 persen, dengan jumlah pendapatan regional perkapita sebesar 2.007.960 rupiah. Angka PDRB atas dasar harga berlaku, pada tahun 2003 sebesar 3.613.865 (juta rupiah). Mengalami tambahan

sebesar 6,07 persen dari tahun 2002 yang hanya sebesar 3.407.021 (juta rupiah). Kemudian bila PDRB ini dilihat atas dasar harga konstan 1993, maka PDRB pada tahun 2003 adalah sebesar 1.361.653 juta rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 3,52 persen dari tahun 2002 yang sampai mencapai 1.315.340 juta rupiah. Angka 3,52 persen tersebut merupakan laju pertumbuhan ekonomi daerah Maluku pada tahun 2003 dibandingkan dengan kondisi ekonomi pada tahun 2002.

Sektor ekonomi yang sangat mempengaruhi perekonomian Propinsi Maluku adalah sektor Pertanian, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Jasa-jasa serta sector Industr Pengolahan. Dilihat dari struktur ekonominya, maka terlihat bahwa untuk wilayah KTL, kecuali kawasan Kalimantan, sector pertanian masih memegang peranan penting diikuti oleh sector jasa dan pertambangan serta konstruksi .

Sejak tahun 2000 perkembangan Industri di Propinsi Maluku mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 1999/2000, hal ini karena situasi keamanan yang semakin membaik, sedangkan tahun 2000 sampai dengan 2003 mengalami peningkatan. Keadaan tersebut terjadi baik pada kelompok Industri Aneka, Industri Mesin Logam dan Kimia, Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan maupun Industri Kecil dan Kerajinan. Sedangkan jumlah usaha Pertambangan pada tahun 2003 adalah sebanyak 2 perusahaan. Jumlah ini tidak mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Produksi Pertambangan pada tahun 2002 hanya minyak bumi dengan produksi sebesar 1.212.687 barel. Produksi Listrik PLN Wilayah IX Maluku selama tahun 2003 adalah 195.320.366 KWH dengan

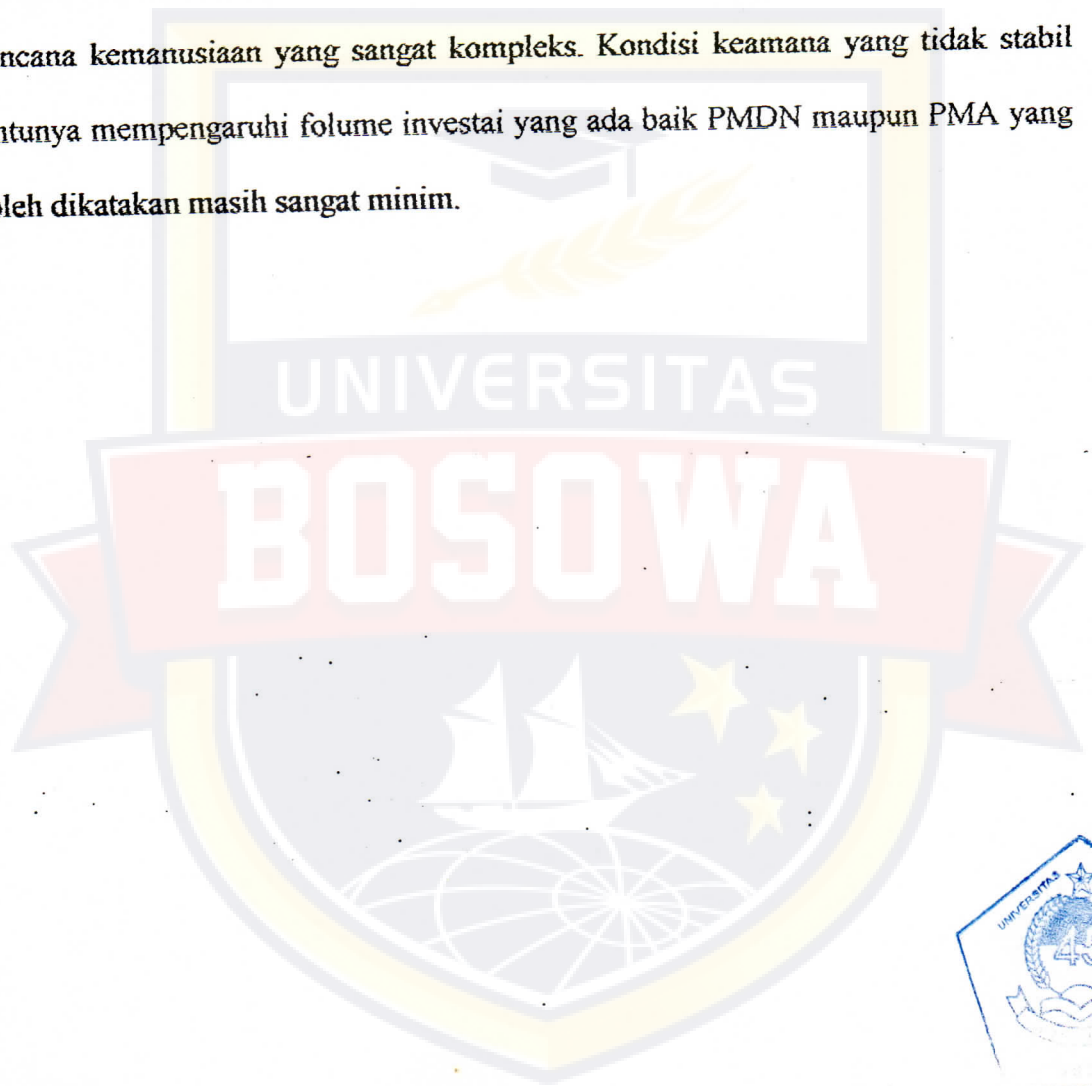
produksi tertinggi adalah PLN Cabang Ambon sebanyak 161.215.616 KWH (82,54 persen) diikuti PLN Cabang Tual sebanyak 34.104.750 KWH (17,46 persen).

Perkembangan nilai ekspor Maluku pada tahun 2003 mengalami penurunan dari 142.505,69 US\$ pada tahun 2002 menjadi 105.620,90 US\$ pada tahun 2003 atau turun sebesar 25,88 persen. Perkembangan nilai ekspor Maluku pada tahun 2003 mengalami surplus bila dibandingkan dengan nilai impor. Yaitu nilai ekspor Maluku pada tahun 2003 sebesar 105.620,90 US\$, sedangkan nilai impor sebesar 6.794,05 US\$, sehingga terjadi surplus ekspor terhadap impor sebesar 98.826,85 US\$. Bila dibandingkan nilai surplus tahun 2002 ternyata mengalami penurunan yaitu 139.308,69 US\$, sedangkan pada tahun 2003 sebesar 98.826,85 US\$.

Pada Juni 1994 Pemerintah melalui PP No. 20 thn 1994 (19 Mei) mengeluarkan kebijakan baru, yaitu tentang kepemilikan saham. Keluasan ini antaranya berupa persyaratan investasi maupun cakupan bidang usaha yang boleh dirambah oleh investor asing. Kontroversinya adalah PMA dapat menguasai 100 persen saham sebuah perusahaan di seluruh Indonesia. Untuk usaha patungan yang harus dimiliki pihak pemerintah cukup 5 persen. Ditambah penghapusan terhadap pembatasan nilai investasi yang semula minimal UUS\$ 50 juta, dan turun menjadi US\$ 2 juta. Untuk PMA *join venture* diijinkan untuk merambah sektor-sektor yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Dari sisi lain terlihat adanya konsentrasi wilayah usaha yang tidak merata. Dimana kawasan barat lebih diminati daripada kawasan timur. Melihat kenyataan bahwa KTI merupakan kawasan berpotensi besar namun belum actual. KTI

merupakan wilayah yang potensial dengan kekayaan alam yang dimilikinya, hanya saja KTI selama ini belum sepenuhnya digarap. Sat contohnya adalah pengelolaan tambang di Irian Jaya oleh PT. Freeport secara besar-besaran yang tidak hanya memberi devisa bagi Negara, tetapi juga menciptakan lapangan kerja. Sebagai salah satu daerah di Kawasan Timur Indonesia, Propinsi Maluku diperparah lagi dengan bencana kemanusiaan yang sangat kompleks. Kondisi keamana yang tidak stabil tentunya mempengaruhi volume investasi yang ada baik PMDN maupun PMA yang boleh dikatakan masih sangat minim.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Konflik Ambon Terhadap Investasi Asing di Propinsi Maluku

Propinsi Maluku yang lebih dikenal sebagai daerah kepulauan karena karakteristik wilayahnya yang terdiri atas pulau - pulau kecil, pulau – pulau sedang dan pulau – pulau besar secara geografis sesuai Undang – Undang RI Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki wilayah seluas 712.479,69 yang meliputi lautan seluas 658.294,69 km² dan wilayah daratan seluas 54.185 km² sehingga menunjukkan bahwa dua pertiga dari luas wilayah Propinsi Maluku ini merupakan wilayah perairan dan sepertiga sisanya adalah wilayah daratan.

Kondisi geografis daerah tersebut bukan merupakan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, namun sebaliknya merupakan peluang dalam pengembangan berbagai investasi yang memiliki berbagai keunggulan komparatif apabila dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini karena potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya cukup besar, terutama dari Sektor Perikanan, Pertambangan, Kehutanan, Kepariwisata dan sector pertanian serta sector Jasa lainnya. Namun demikian bahwa potensi sumber daya alam yang tersedia tersebut hingga saat ini belum dikelola secara optimal sehingga masih memerlukan penanganan secara intensif untuk menjadi kekuatan ekonomi daerah yang produktif. Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang tersedia sangatlah membutuhkan

investasi yang cukup besar, sehingga perlu adanya upaya untuk menarik minat investor dalam menanamkan modalnya di Daerah Maluku, khususnya investor Asing.

Sampai dengan saat ini kontribusi investai sektor swasta dalam pembangunan di Daerah Maluku masih didominasi oleh investasi fasilitas penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan (PMA). Adapun perkembangan penanaman modal di Daerah Maluku yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah mendapat persetujuan Pemerintah adalah sebanyak 27 proyek dengan nilai investai sebesar US \$ 411,7 juta, dari rencana proyek tersebut di atas yang telah terealisasi adalah 13 proyek dengan nilai investasi sebesar US \$ 185,3 juta.

Melihat dari perkembangan penanaman modal tersebut di atas menunjukkan bahwa masi sangat rendahnya relisasi proyek – proyek dibandingkan dengan rencana yang telah disetujui Pemerintah, hal ini erat kaitannya dengan peristiwa tragedi kemanusiaan yang terjadi di Propinsi Maluku sejak tanggal 19 januari 1999 yang hingga saat ini telah berlangsung kurang lebih 4 tahun, menyebabkan kegiatan investasi menurundrastis bahkan selama kurun waktu tersebut tidak ada minat investor asing untuk menanamkan modalnya di daerah ini dan lebih memprihatinkan adalah terjadi eksodus/pengungsian beberapa perusahaan besar Sektor Perikanan serta mengalihkan kegiatan usahanya di Propinsi lain karena kondisi keamanan yang belum kondusif.

Kehidupan masyarakat Maluku yang sampai saat ini dikenal sebagai masyarakat yang ramah dan terdiri dari berbagai suku dan agama hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati satu dengan lainnya sehingga sebagian besar masyarakat Indonesia menjuluki Propinsi Maluku sebagai Miniatur Indonesia. Akan tetapi julukan ini tidak selamanya dapat dipertahankan lebih lama akibat tragedi kemanusiaan yang telah meluluhkan seluruh sendi – sendi kehidupan perekonomian masyarakat Maluku dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan para investor terhadap jaminan kelangsungan aktifitas investasi di Propinsi Maluku.

Di lain pihak konflik sosial yang terjadi berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat, telah terbentuk persepsi dan hidup yang melahirkan trauma sosial individu, kelompok dan komunitas yang tingkat sensitifitas yang tinggi. Sikap dan tingkah laku masyarakat yang demikian rentan bila tidak disikapi dan diantisipasi akan menjadi kendala bagi pelaksanaan tugas – tugas umum pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Propinsi Maluku.

Disisi lain aktifitas ekonomi masyarakat sektor informasi telah terukur dan berkembang alternatif bidang usaha yang dapat memberikan jaminan bagi kelangsungan hidup keluarga di tengah kondisi perekonomian yang sedang terpuruk. Kondisi seperti ini pula dicermati dan difasilitasi, dibina serta dikembangkan untuk berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai penopang perekonomian daerah Maluku di masa mendatang.

Terkait dengan kenyataan ini perlu adanya revitalisasi, redevenisi dan reaktualisasi terhadap pembangunan dunia usaha yang meliputi usaha swasta, usaha menengah kecil informasi tradisional yang diharapkan menjadi pilar perekonomian nasional dengan melibatkan dinas / instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya, organisasi profesi dan dunia usaha guna memfasilitasi kegiatan – kegiatan yang mendukung terwujudnya kemandirian sektor usaha menengah, kecil, informasi dan tradisional melalui program pemberdayaan usaha berbasis ekonomi kerakyatan yang terlaksana secara terpadu dan terkoordinir serta integralistis dan komprehensif.

Persoalan penanaman modal tidak hanya terbatas pada upaya percepatan investasi dan realisasi pelaksanaan investasi di daerah, namun perlu juga memperhatikan kondisi politik dan keamanan yang berlaku saat ini. Kegiatan penanaman modal harus juga memberikan akses bagi masyarakat, lembaga dan organisasi guna memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat di dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penanaman modal asing itu sendiri harus dapat menciptakan lapangan kerja yang seluas – luasnya dalam rangka mengatasi tingkat pengangguran yang semakin hari cenderung mengalami kenaikan disebabkan oleh keterbatasan akses kemampuan, kurangnya pengetahuan dan keterampilan serta kurang adanya peluang kerja yang terbuka.

Pengaruh konflik SARA yang melanda seluruh daerah di Propinsi Maluku, berdampak luas terhadap perkembangan realisasi pelaksanaan penanaman modal asing yang ditandai dengan berbagai kenyataan yang saat ini dialami, antara lain :

1. Menurunnya minat investor asing untuk menanamkan modalnya di daerah Maluku. Hal ini diindikasikan dengan hanya 3 (tiga) perusahaan yang sejak tahun 1999 s/d 2003 dapat merealisasikan kegiatan karena kondisi keamanan yang belum kondusif.
2. Tingkat produksi PMA menurun disebabkan karena tingginya biaya operasi sebagai akibat naiknya harga berbagai komponen produksi sehingga perusahaan menghentikan sebagian kegiatan operasionalnya.
3. Berkurang dan terbatasnya lapangan kerja sebagai akibat tidak beroperasinya beberapa perusahaan PMA dan bahkan ada perusahaan yang telah mengalihkan usaha ke Propinsi lain.
4. Kurangnya penyebaran informasi potensi komoditi unggulan dan kawasan industri yang ada serta kurangnya peluang usaha di daerah. Hal ini disebabkan karena tidak berjalan secara efektif kegiatan promosi sebagai akibat terbatasnya akses transportasi dan komunikasi.

Berkaitan dengan dampak konflik terhadap investasi asing di propinsi Maluku, berikut ini data proyek PMA yang beroperasi di Propinsi Maluku yang disetujui pada tahun 2000 / 2005 dan tahun 1994 s/d 1999 :

TABEL 1
DATA PROYEK PMA TAHUN 2000-2005

No	NAMA PERUSAHAAN No & Tgl. SP	LOKASI PROYEK	BIDANG USAHA	INVESTASI	TENAGA KERJA			REALISASI			NEGAR A ASAL	Ket	
					RENCAN A	REALI SASI	RENC A	TKI	TKA	TKI			TK A
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	PT.Tirta Maluku .396/PPMA/2001 Tgl.16-5-2001	Kota Ambon	Konsultasi Bisnis & Manajemen	10	-	-	-	-	-	Jepang	Aktif		
2	PT.Meca Nunusaku Sejahtera 01/8/1/PPMA/2003 Tgl.26 agst 2003	Kab Mal Tengah	Sawmill	500	-	53	9	0	0	Australia	Aktif		
3	PTS.&.T.Mitra Mina Industri 243/1/PPMA/2004 Tgl.6 Mei 2004	Kota Ambon	Penangkapan ikan industri pengolahan dan pengawetan ikan	5.870	1.468	167	18	0	0	Thailand	Aktif		
4	PT.TA.Asia Oceanic 297/1/PPMA/2004 Tgl.21 Mei 2004	Kota Ambon	Penangkapan ikan, industri pengolahan, dan pengawetan ikan	3.800	950	2.003	8	0	0	Singapura R.R.Cina Malaysia	Tidak Aktif		
5	PT.Empire Fisheries Tanimbar 620/1/PPMA/2004 Tgl. 10 Sep 2004	MTB	Industri pengolahan dan pengawetan ikan	50.000	12.500	406	20	0	0	Thailand	Tidak Aktif		
6	PT.Shorin Bali 230/III/PPMA/2004 Tgl.15 Maret 2004	Matuku Tengah	Coldstroge	1000	500	43	20	0	0	Jepang	Aktif		

No	NAMA PERUSAHAAN No & Tgl. SP	LOKASI PROYEK	BIDANG USAHA	INVESTASI		TENAGA KERJA			REALISASI			NEGAR A ASAL	Ket
				RENCANA	REALI SASI	RENCANA NA TKI	TKA	TKI	TK A	TKA	TKI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	PT.Nissui Investment and Managemen Indonesia 542/1/PMA/2004 Tgl.23 Sep 2004	Maluku (seluruh wilayah Indonesia)	Perdagangan Ekspor & Import serta jasa konstruksi,bisnis dan managemen	2000	0	66	6	0	0	Singapura	Tidak Aktif		
8	PT.Bersama Sejahtera 343/1/PMA/2005 Tgl. 08 april 2005	Kota Ambon	Industri Pembekuan Ikan	3000	0	227	1	0	0	Jepang	Aktif		
9	PT.Wainibe Wood Industri 71/V/PMA/2003 Tgl.4 sep. 2003	Kabupaten Buru	Industri Kayu	36.000	9.000	402	15	0	0	Thailand Korea	Tidak Aktif		
Jumlah				102.180	24.418	3.367	97						

TABEL II

DATA PROYEK PMA TAHUN 1994 - 1999

No	NAMA PERUSAHAAN No & Tgl. SP	LOKASI PROYRK	BIDANG USAHA	INVESTASI RENCANA	TENAGA KERJA		REALISASI			NEGARA ASAL	KET
					REALISASI	RENCANA	TKA	TKI	TKA		
1	2 PT. Pini's Diving & Tourism No.402/II/PMMA/1990 Tgl.14-12-1990 No.240/II/PMMA/1995 Tgl.12-Juni-1995	3 Kota Ambon	4 Parwisata	5 300	6 520	7 8	8 1	9 -	10 -	11 Singapur	12 Aktif
2	PT. Tofico No.28/II/PMMA/ 1994 Tgl.8-5-1994	Kabupaten SBB	Perikanan	6.018	-	20.000	9	-	-	Thailand	Aktif
3	PT. Wainibe Wood Industri No.54/II/PMMA/ 1995 Tgl.4-9-1995	Kab. Buru	Industri Kayu	12.000	-	5.000	8	-	-	Thailand Korea	Aktif
4	PT. Maluku Pearel Development No. 1750/Pres/7/1967 Tgl.18-7-1967 No.137/II/PMMA/1995 5 Tgl.30-Juni-1995	Kab. Kepulauan Aru	Budidaya Mutiara	1.199	45.031,29	10	4	-	-	Jepang	Aktif
5	PT. Tinggen Banda Sejahtera No.406/II/PMMA/1995 Tgl.21-7-1995	Kab. Maluku Tengah	Perikanan	200.000	-	1.700	20	-	-	Jepang	Aktif



N	NAMA PERUSAHAAN No & Tgl SP	LOKASI PROYK	BIDANG USAHA	INVESTASI RENCANA	TENAGA KERJA		REALISASI			NEGARA ASAL	KET
					REALISASI	RENCANA	TKA	TKI	TKA		
0											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	PT. Dream Sukses Arindo No.137/II/PPMA/1995 5 Tgl.30-10-1995	Kota Ambon	Jasa Lainnya	1.754	1.119,80	97	-	-	-	Singapur	Aktif
7	PT.TA.Asia Oceanic No.327/II/PPMA/1994 4 Tgl.20-Juni-1994	Kota Ambon	Perikanan	5.300	2.200	3.000	15	-	-	Singapur R.R.Cina Malaysia	Aktif
8	PT.Meca Nunusaku Sejahtera No.407/PPMA/ 1994 Tgl.25-April-1994	Kab. Maluku Tengah	Swamill	750	-	70	10	-	-	Australia	Aktif
9	PT Nissui Investnebt and Management Indonesia No.525/II/PPMA/1995 Tgl.15-Mei-1995	Maluku	Perdagangan Ekspor & Import serta jasa Konstruksi,bisnis dan Managemen	4.000	-	90	10	-	-	Singapura	Aktif
10	PT. Shorin Bali No.305/II/PPMA/1995 5 Tgl. 28-februari-1995	Kab Maluku Tengah	Coldstoge	1500	700	50	5	-	-	Jepang	Aktif
	Jumlah			232.821	49.570	29.893	82				

Keterangan Tabel I Dan II :

- TKI : Tenaga Kerja Indonesia
- TKA : Tenaga Kerja Asing
- MTB : Maluku Tenggara Barat
- SBB : Seram Bagian Barat
- JLH : Jumlah

Kondisi investai asing Propinsi Maluku pada periode 1994 – 1999 yang terlihat pada table II bahwa berdasarkan jumlah perusahaan yang beroperasi di berbagai daerah di Propinsi Maluku adalah terdiri dari 10 (sepuluh) perusahaan dan kesemua proyek PMA tersebut secara aman dapat menjalankan aktifitas operasinya dengan normal / aktif, oleh karena pada periode tersebut stabilitas politik dan keamanan daerah Maluku sangatlah kondusif serta ditambah dengan belum tersentuhnya potensi-potensi SDA yang melimpah oleh para investor –investor asing yang sebenarnya sudah layak dieksploitasi dan eksplorasi. Potensi Sumber Daya Alam yang melimpah ini tentunya jika didukung dengan kondisi keamanan yang stabil maka sudah pasti akan menjadi satu daya tarik yang efektif untuk menarik minat investor asing dari berbagai Negara untuk mananamankan modalnya di propinsi Maluku. Kecenderungan akan meningkatnya investasi asing di Propinsi Maluku tidaklah dapat dengan mudah dipertahankan, hal ini disebabkan kerusuhan yang besar-besaran melanda hampir semua pelosok daerah di Propinsi Maluku. Dampak daripada konflik itu sendiri terhadap tingkat investasi asing di Propinsi Maluku akan jelas terlihat pada komparasi jumlah proyek PMA/perusahaan asing pada ke-Dua periode antara 1994-1999 dan 2000-20005.

Tepat Pada tahun 1999 konflik Maluku pecah dan akibat dari konflik tersebut terdapat 4 (empat) perusahaan asing yang tidak dapat melanjutkan ijin operasinya secara total dengan alasan yang sama yaitu karena kondisi keamanan dan keselamatan mereka dan perusahaannya tidak terjamin , sedangkan 6 (enam) perusahaan lain tetap melanjutkan ijinnya, itupun ada beberapa di antara perusahaan tersebut yang sampai saat ini belum dapat beroperasi dengan normal atau tidak aktif.

Sesuai dengan gambaran yang ada pada tabel I diatas maka terlihat bahwa secara kuantitatif jumlah proyek PMA/ perusahaan yang berinvestasi pada periode 2000 s/d 2005 mengalami penurunan, walaupun berdasarkan jumlah perusahaan, penurunan itu tidaklah signifikan jika dikomparasikan dengan data proyek PMA yang beroperasi pada periode 1994 s/d 1999. jumlah perusahaan PMA yang telah disetujui pemerintah untuk beroperasi di Propinsi Maluku pada periode 2000 s/d 2005 adalah 9 (sembilan) perusahaan dengan bidang usaha yang bervariasi, dan bidang usaha yang sangat dominan adalah dibidang perikanan. Diantara ke – sembilan perusahaan yang telah disetujui pemerintah, hanya 5 (lima) perusahaan yang dapat beroperasi walupun intensitas produksi tidak terlalu maksimal dan produktif jika dikomparasikan pula dengan volume investasi asing pada periode 1994 -1999 yang cenderung meningkat, sedang kan 4 (empat) perusahaan lainnya belum dapat menjalankan aktifitas perusahaannya / tidak aktif. Sesuai dengan apa yang ditemukan di lapangan bahwa seluruh Penanaman Modal Asing di Propinsi Maluku adalah dalam bentuk joint Investmen. kondisi investasi yang cenderung

memperhatikan ini merupakan akibat kondisi sebagian wilayah Propinsi Maluku yang belum stabil atau tidak kondusif serta trauma yang belum hilang akibat tragedi kemanusiaan beberapa tahun lalu yang melanda seluruh wilayah di propinsi Maluku.

Berdasarkan penjelasan ketua BKPMMD Propinsi Maluku Ir. M. Z. Sangadji melalui wawancara singkat dengan beliau pada tgl 1 oktober 2005 di ruang kerjanya mengatakan bahwa ada juga sebagian perusahaan yang belum berakhir ijin operasinya telah menghentikan aktifitas perusahaan atau menutup perusahaan tersebut dan kemudian terjadi eksodus investor asing ke wilayah – wilayah lain di luar Maluku. Eksodus investor asing secara besar- besaran terjadi pada tahun 1999 – 2000. ironisnya lagi khusus di bidang perikanan, aktifitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing yang beroperasi diperairan dan teritorial Propinsi Maluku di saat skala konflik masih meningkat, mereka tetap dilakukan penangkapan namun kapal-kapal tersebut tidak berlabuh di pelabuhan dan dermaga –dermaga yang telah disediakan oleh pemerintah Propinsi Maluku dan pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa walaupun secara ekonomi sangat merugikan. aktifitas penangkapan ini terus berlangsung kurang lebih 3 tahun oleh karena aktifitas pemerintahan juga pada saat itu tidak normal akibat konflik yang terus meningkat dan menyebar secara serentak di seluruh wilayah Propinsi Maluku. Konflik yang terjadi bukan hanya menghancurkan berbagi infrastruktur ekonomi, fasilitas umum, rumah – rumah masyarakat tetapi juga kantor Gubernur dan kantor BKPMMD ikut di bakar, di bumi hanguskan dengan lemparan – lemparan bom .



Faktor keamanan, kepastian hukum dan trauma sosial telah menjadi alasan yang selalu dilontarkan oleh para investor-investor asing mengapa mereka harus menghentikan aktifitas investasinya dan hengkang dari Propinsi Maluku. Kondisi ini tentunya tidak dapat dibiarkan secara terus – menerus seperti ini, Sudah merupakan tanggung jawab pemerintah untuk bekerja keras dan melakukan langkah – langkah antisipatif dan proaktif dalam rangka untuk menstabilkan kondisi investasi yang sangat memprihatinkan ini .berkaitan dengan upaya untuk menghadirkan investor asing maka berikut ini akan peneliti gambarkan langkah – langkah pemerintah untuk menstabilkan kondisi investasi di propinsi Maluku melalui BKPMMD Propinsi Maluku :

B. Upaya Pemerintah Propinsi Maluku Melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal Untuk Menghadirkan Investor Asing

Berdasarkan Pasal 24 dan 25 Peraturan Daerah Propinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2001 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga teknis Daerah Propinsi Maluku, dinyatakan bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Maluku mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang penanaman modal.

Visi pembangunan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah adalah :
“Terwujudnya Peningkatan Investasi Penanaman Modal Dalam Modal Asing (PMA) ke Wilayah Maluku secara berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berbasis pada sumber daya lokal serta mendukung sistem ekonomi kerakyatan”.

Sebagaimana upaya mewujudkan Visi sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka secara umum misi yang diemban oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah pada periode Tahun 2003 – 2008 adalah meningkatkan Investasi pada sektor – sektor unggulan daerah serta mengembalikan kepercayaan para investor terhadap kelangsungan berinvestasi di Propinsi Maluku. Langkah – langkah konkrit guna mewujudkan misi tersebut adalah :

1. Mewujudkan perbaikan dan pemulihan kembali perekonomian dan kondisi keamanan di daerah Maluku untuk menggerakkan kegiatan investasi asing yaitu telah diberikan jaminan keamanan dan keselamatan berusaha dengan ditingkatkannya keamanan pada lokasi-lokasi perusahaan-perusahaan asing
2. Mewujudkan koordinasi dengan instansi terkait, pelaku usaha dan perbankan serta pemerintah Kabupaten / Kota guna peningkatan pengembangan investasi asing di daerah.
3. Mewujudkan kegiatan penanaman modal asing yang lebih adil. Merata dan berwawasan lingkungan, melalui optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya daerah.
4. Mewujudkan iklim investasi asing yang lebih kondusif dan stabil untuk meletakkan dasar investasi asing yang berkelanjutan.
5. Memberdayakan masyarakat dunia usaha dan seluruh kekuatan ekonomi terutama pengusaha kecil dan menengah serta koperasi (PKMK), melalui kesempatan berusaha dan kesempatan berkerja.

6. Mewujudkan supremasi hukum yang menjamin tegaknya kepastian hukum dalam bidang penanaman modal asing.
7. Mewujudkan Otonomi daerah di bidang penanaman modal asing sesuai dengan potensi dan kemampuan Daerah Kabupaten / Kota.
8. Mewujudkan kerjasama Internasional yang mengutamakan kepentingan Nasional dalam rangka meningkatkan penanaman modal asing yang didukung kegiatan promosi yang proaktif.
9. Membangun aparatur penanaman modal yang profesional berbasis kinerja guna mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Government).

Rencana dan pengembangan penanaman modal asing Propinsi Maluku tahun 2003 – 2008 disusun dan ditetapkan program – program Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Maluku tahun 2003 – 2008 yang akan datang dijabarkan lebih lanjut dalam Program Pembangunan Daerah (PROPERDA) di bidang penanaman modal dan Rencana Pembangunan Tahunana Daerah (REPETADA) di bidang penanaman modal dengan pendekatan prioritas program.

Program - program prioritas Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Maluku Tahun 2003 – 2008 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan rutin Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Maluku dengan telah dilakukannya pemutakhiran data-data investasi asing.

Program ini di arahkan dengan tujuan untuk meningkatkan system dan mekanisme kerja serta kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BKPMMD Propinsi Maluku.

1. Pemantapan Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal asing tingkat tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi, Regional dan Nasional.

Program ini diarahkan dengan tujuan memantapkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi tentang arah dan kebijakan perencanaan pengembangan penanaman modal asing di tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi Regional dan Nasional. Salah satu kegiatannya adalah penyiapan usulan bidang – bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanamn modal asing dan bidang – bidang usaha unggulan / prioritas.

2. Penyusunan dan penetapan kebijakan penciptaan iklim investasi asing dan iklim usaha yang kondusif di daerah.

Program ini diarahkan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan – kemudahan dalam bentuk insentif khusus daerah, penyederhanaan ketentuan dan persyaratan penanaman modal asing, memberikan transparansi dan kepastian hukum serta memberikan perlindungan dan jaminan berinvestasi di daerah.

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

- a. Pemberdayaan Satuan Tugas penyelesaian permasalahan penanaman modal asing tingkat propinsi.

- b. Penetapan bidang usaha unggulan sesuai potensi dan daya dukung Kabupaten/Kota dalam bentuk bidang – bidang usaha unggulan/prioritas.
 - c. Penyiapan usulan bidang – bidang usaha tertutup mutlak untuk penanaman modal, PMA dan bidang usaha unggulan / prioritas
 - d. Penetapan kebijakan pemberian insentif khusus sesuai dengan kewenangan daerah kabupaten/Kota.
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk menyiapkan kawasan industri bagi kegiatan investasi asing.
 - f. Memfasilitasi dunia usaha untuk memperoleh bantuan modal/kredit usaha dari berbagai lembaga perbankan.
4. Penyebarluasan informasi peraturan – peraturan dan kebijakan penanaman modal asing.
- Program ini diarahkan dengan tujuan tersebarnya informasi tentang peraturan – peraturan dan kebijakan penanaman modal daerah dan nasional kepada instansi terkait dan masyarakat khususnya pelaku usaha.
5. Program pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal Asing (PMA).
- Program ini diarahkan dengan tujuan untuk mempercepat realisasi pelaksanaan PMA sesuai surat persetujuan penanaman modal asing, memantau pelanggaran / penyimpangan serta masalah – masalah yang dihadapi PMA dalam kegiatan operasionalnya.
6. Promosi dan Kerja sama Penanaman Modal asing.

Program ini diarahkan dengan tujuan untuk membangkitkan minat berinvestasi bagi para calon penanam modal asing.

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

- a. Penyelenggaraan promosi penanaman modal asing baik dalam maupun luar negeri, seperti seminar, pameran, temu usaha dan lokakarya.
 - b. Pengiriman misi penanaman modal asing ke daerah lain dan luar negeri.
 - c. Pelaksanaan kerjasama luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat.
 - d. Penyiapan materi perjanjian dalam rangka kerjasama sub regional di bidang penanaman modal asing dengan memanfaatkan kerjasama ekonomi sub regional Asean (KESR-ASEAN) Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East Groet Area. (BIMP-EAGA).
7. Pengembangan dan identifikasi potensi serta peluang investasi asing di daerah.

Program ini diarahkan dengan tujuan untuk menyediakan data potensi komoditi/produk unggulan daerah dan peluang usaha daerah untuk disebarluaskan kepada masyarakat pelaku usaha.

8. Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Program ini diarahkan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintah dan pelaku usaha daerah.

9. Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Asing.

Program ini diarahkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan prima bagi pelaku usaha guna menggairahkan minat berusaha di daerah.

Kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

- a. Pemberian persetujuan seluruh proyek baru dan perluasan PMA atas bidang usaha / proyek
- b. Pemberian persetujuan perubahan rencana proyek PMA atas persetujuan proyek sebagaimana dimaksud pada huruf a ;
- c. Pemberian perizinan perubahan rencana penanaman modal asing dalam rangka PMA sebagaimana dimaksud dalam huruf a. meliputi :
 1. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT)
 2. Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (IKTA) berdasarkan visa untuk maksud kerja yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang di bidang keimigrasian ;
 3. Izin Usaha Tetap (UIT) / Izin Usaha Perluasan.
- d. Pemberian insentif khusus penanaman modal yang menjadi kewenangannya;

10. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal (Simpedal) di Daerah.

Program ini diarahkan dengan tujuan untuk menyediakan PMA, potensi dan produk unggulan daerah dalam bentuk situs web guna disebarluaskan.

Kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data persetujuan dan realisasi proyek PMA.

- b. Pengumpulan dan pemutakhiran data serta informasi promosi penanaman modal daerah.
- c. Pengumpulan dan pengolahan data profil investasi Kabupaten / Kota.

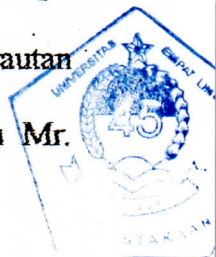
Dalam rangka meningkatkan investasi asing serta memperluas pasar produk hasil kelautan dan perikanan, Dep.KP melakukan promosi investasi ke Denmark dan Belanda tanggal 25 Mei s.d. 2 Juni 2005. Fokus kegiatan pada promosi investasi adalah pengembangan industri rumput laut dan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di provinsi Maluku. Promosi ini dilakukan oleh Gubernur Maluku beserta staff dan jajaran Ditjen PK2P.

Acara promosi diisi dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan National Fisheries Policy – Denmark

National Fisheries Policy adalah sebuah lembaga setingkat Direktorat Jenderal di bawah Departemen Pangan, Pertanian dan Perikanan – kerajaan Denmar. Institusi ini merupakan kepanjangan tangan pemerintah yang berfungsi melakukan manajemen di bidang perikanan. Promosi investasi sektor kelautan dan perikanan dilakukan pada tanggal 26 Mei 2005 dan diterima oleh Mr. Morgan Schou, direktur National Fisheries Policy.

Direktur National Fisherie Policy menjelaskan mekanisme manajemen penangkapan ikan di Uni Eropa. Penangkapan ikan di Uni Eropa diatur oleh suatu lembaga di bawah Uni Eropa. Lembaga ini melakukan stock assessment



yang kemudian membagikan kuota penangkapan pada negara anggota Uni Eropa.

Akibat sistem kuota tersebut, banyak armada penangkapan ikan Denmark yang terpaksa tidak diperkenankan operasional. Sehubungan dengan itu, dimungkinkan kerjasama penangkapan ikan yang sifatnya penanaman modal asing dalam upaya memperkuat armada penangkapan ikan Indonesia sekaligus mengurangi pencurian ikan. Menyikapi hal ini, delegasi Indonesia menjelaskan bahwa Indonesia membolehkan usaha penangkapan ikan oleh PMA untuk dioperasionalkan di wilayah ZEEI. Pemerintah mempersiapkan 3 skema PMA di bidang penangkapan ikan yaitu sistem *purchase and installment*, *joint venture*, dan lisensi.

Di samping itu, Direktur *National Fishery Policy* menerangkan pengembangan SDM sektor perikanan dengan membangun sekolah maritim bertaraf internasional yaitu *World Maritime Institute*. Institusi ini merupakan unit pelaksana teknis Departemen Pangan, Pertanian dan Perikanan yang berfungsi dalam pengembangan SDM. Dalam upaya pengembangan SDM, Direktur *National Maritime Policy* menawarkan kerjasama pendidikan bagi pemuda nelayan Indonesia.

2. Pertemuan dengan Dansk Industri - Denmark

Dansk industri merupakan kamar dagang Denmark. Acara promosi dilakukan pada tanggal 27 Mei 2005 jam 10.00-12.15 bertempat di Dansk Industri Building. Pertemuan diterima oleh Mr. POULMELGAARD JENSEN dari THE

DANISH SEAFOOD INDUSTRY, staff dari perusahaan MAERSK (transportasi laut) dan MR. OLSEN dari DANISCO (industri pengolahan rumput laut). Acara diisi dengan pemaparan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan tentang potensi dan kebijakan pembangunan sektor perikanan di Propinsi Maluku, Pemaparan lingkup usaha THE DANISH SEAFOOD INDUSTRY, MAERSK DAN DANISCO serta permasalahannya.

Pihak Dansk industri menerangkan permasalahan yang dihadapi yaitu menurunnya volume penangkapan ikan yang berakibat pada diberlakukannya sistem oleh Uni Eropa. Kebijakan ini menyebabkan terdapat armada penangkapan yang tidak operasional dan membebani pemerintah yang mempunyai kewajiban memberikan kompensasi. Sehubungan dengan itu, dibicarakan kemungkinan kerjasama pengalihan armada ikan dalam upaya pemanfaatan sumber daya perikanan Indonesia. Disamping itu, beliau juga mengingatkan pentingnya peningkatan mutu produk hasil perikanan yang akan diekspor ke Uni Eropa karena Uni Eropa menerapkan food safety policy.

Pertemuan dengan MAERSK Company diisi dengan kemungkinan kerjasama pengangkutan produk hasil perikanan Maluku khususnya produk perikanan dan kemungkinan pembangunan pelabuhan perikanan oleh swasta.

Danisco merupakan perusahaan besar keempat di Denmark yang bergerak di pengolahan rumput laut. Perusahaan ini memproduksi semi refine dan bubuk rumput laut yang kemudian diolah menjadi bahan industri kimia dan kosmetik. Perusahaan ini mempunyai cabang di Bali yang telah melakukan pembinaan

dan pembelian rumput kering. Dalam acara temu bisnis ini, pihak Danisco bersedia melakukan ekspansi usaha di Maluku, melakukan pembinaan budidaya rumput laut dan melakukan jaminan pasar rumput laut kering.

3. Pertemuan dengan The Industrialisation Fund - Denmark

Pertemuan ketiga dilakukan dengan *THE INDUSTRIALISATION FUND* pada tanggal 27 Mei 2005 bertempat di *THE INDUSTRIALISATION FUND building*. *THE INDUSTRIALISATION FUND* merupakan lembaga keuangan yang dimiliki oleh pemerintah Denmark bertujuan membantu pembangunan di negara-negara berkembang. Lembaga ini didirikan pada tahun 1967 dengan total asset kurang lebih DKK 6,081 million. Lembaga ini membiayai proyek-proyek swasta yang berjumlah 530 proyek dan tersebar di 71 negara.

Di Indonesia lembaga ini telah membiayai kegiatan :

- Bekerjasama dengan Broncharter yang bergerak dibidang penangkapan ikan
- Bekerjasama dengan Cowi yang bergerak dibidang komputer dan rel kereta api
- Bekerjasama dengan Danindo yang bergerak dibidang penangkapan
- Bekerjasama dengan Dankaffe yang bergerak di bidang makanan dan minuman
- PT Aalborg Industries yang bergerak di bidang pabrik metal
- PT Wahana Derby yang bergerak di bidang cold storage

Lembaga ini menawarkan kerjasama usaha yang sifatnya komersial dengan skema pendanaan 35% dari *THE INDUSTRIALISATION FUND*, dan 65% lainnya dari pihak swasta, sindikasi lembaga keuangan lainnya.

4. Pertemuan Dengan Viserijcooperatie URK – Belanda

Pertemuan dengan VISERIJCOOPERATIE URK dilakukan pada tanggal 30 Mei 2005 bertempat di kantor VISERIJCOOPERATIE URK. Acara diisi dengan pemaparan potensi perikanan Provinsi Maluku dan hal ikhwal VISERIJCOOPERATIE URK. Pertemuan dihadiri oleh 7 staff VISERIJCOOPERATIE URK, 1 DKP, 10 orang delegasi Pemda Propinsi Maluku dan 7 staff KBRI Belanda.

VISERIJCOOPERATIE URK merupakan koperasi nelayan yang telah berumur 80 tahun. Koperasi ini awalnya beranggotakan 8 orang dan terbentuk akibat naiknya bahan bakar minyak. Sekarang ini, VISERIJCOOPERATIE URK merupakan koperasi yang menyediakan faktor input. Koperasi ini juga menyediakan faktor input bagi 6 koperasi nelayan di kerajaan Belanda. Koperasi VISERIJCOOPERATIE URK beranggotakan 130 orang yang memiliki kapal trawl dengan panjang rata-rata 40-50 meter.

Di wilayah industri perikanan URK, berdiri 6 unit cold storage yang memiliki kapasitas besar yang menampung hasil tangkapan nelayan dan produk import dari berbagai negara.

Dalam acara ini, juga dibicarakan kemungkinan pengalihan kapal penangkapan ikan yang tidak operasional (akibat pembatasan oleh Uni Eropa) kepada Pemda

Maluku sebanyak 2 buah. Pengalihan ini diupayakan melalui skema bantuan yang disediakan oleh Pemerintah Belanda. Sehubungan dengan itu, pihak KBRI Belanda akan memfasilitasi kegiatan ini yang akan diawali dengan penandatanganan MoU antara VISERIJCOOPERATIE URK dan Pemda Maluku.

5. Pertemuan dengan Manuputti Cooperatty Asia PT ELTD - Belanda

MANUPUTTI CORPORATION ASIA PTE LTD merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan keuangan dan investasi. Perusahaan ini merupakan partner Departemen Kelautan dan Perikanan dalam proyek pembangunan perikanan terpadu di Propinsi Bengkulu yang sudah mendapatkan persetujuan dari parlemen Belanda.

Pertemuan dengan Pemda Maluku dan MANUPUTTI CORPORATION ASIA PTE LTD bertujuan agar MANUPUTTI CORPORATION ASIA PTE LTD dapat memfasilitasi pendanaan untuk pembangunan sektor perikanan di Provinsi Maluku. Untuk maksud tersebut, MANUPUTTI CORPORATION ASIA PTE LTD akan melakukan kunjungan ke Provinsi Maluku tanggal 13 – 15 Juli 2005 untuk menandatangani Minutes of Meeting dan surat pernyataan Pemda Maluku yang menunjuk MANUPUTTI CORPORATION ASIA PTE LTD sebagai fasilitator pembangunan proyek-proyek perikanan di Provinsi Maluku. (Sumber: Ditjen PK2P)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi ini, maka penulis dapat mengemukakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menurunnya minat investasi asing yang mengakibatkan terjadi kelangkaan investor asing di Propinsi Maluku serta tidak terealisasinya izin yang telah diberikan oleh pemerintah Propinsi Maluku terhadap perusahaan perusahaan asing untuk yang akan beroperasi di Propinsi Maluku. Kondisi investasi yang memprihatinkan ini : tidak terlepas dari dampak Tragedi Berdarah (konflik Ambon) yang melanda Propinsi Maluku tepat pada tahun 1999 , indikasinya adalah : 1).terjadinya eksodus beberapa investor asing ke daerah –daerah lain di luar Maluku 2). tidak lagi diperpanjangnya izin operasi PMA beberapa perusahaan di Propinsi Maluku pada periode 2000 – 2005. 3). Beberapa perusahaan yang memperpanjang izinnya namun belum dapat menjalankan aktifitas operasinya / tidak aktif. 4). jumlah perusahaan mengalami penurunan secara kuantitatif pada periode 2000-2005 dibandingkan dengan periode 1994-1999.
2. Berkaitan dengan upaya untuk menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Propinsi Maluku, maka Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD) sebagaimana upaya mewujudkan Visi

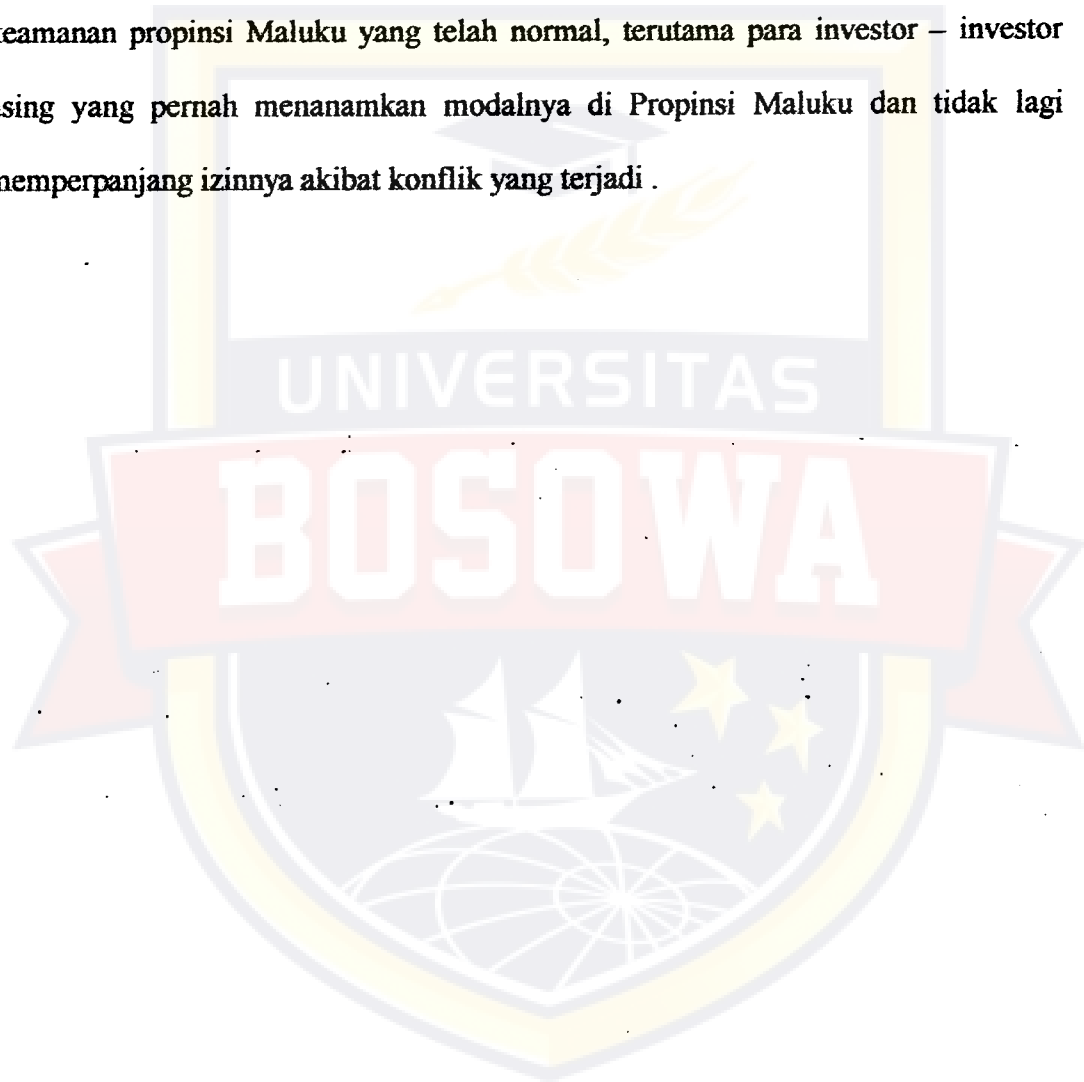
yang telah diuraikan oleh peneliti dalam hasil penelitian di atas adalah meningkatkan investasi asing pada sektor – sektor unggulan daerah serta mengembalikan kepercayaan para investor asing terhadap kelangsungan berinvestasi di Propinsi Maluku antara lain adalah Mewujudkan perbaikan dan pemulihan kembali kondisi keamanan , ekonomi untuk menggerakkan kegiatan investasi, mewujudkan supremasi hukum yang menjamin tegaknya kepastian hukum dalam bidang penanaman modal, dan mewujudkan kerjasama internasional yang mengutamakan kepentingan nasional dalam rangka meningkatkan penanaman modal yang didukung kegiatan promosi yang proaktif.

B. Saran

Sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis hendak mengajukan saran – saran sebagai berikut :

1. Dengan kondisi keamanan Propinsi Maluku yang semakin kondusif saat ini pemerintah perlu terus mengawal dan mempertahankan kondisi ini serta terus melakukan langkah – langkah rekonsiliasi untuk memperkokoh kembali kebersamaan dan rasa damai sesama masyarakat Maluku. sebab ini bukan hanya merupakan harapan masyarakat maluku saja tetapi juga harapan seluruh bangsa Indonesia, dan para investor asing yang sadar akan potensi yang dimiliki Propinsi Maluku.

2. Pemerintah Propinsi Maluku melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) perlu mengintensifkan promosi bukan hanya tentang potensi dan keunggulan sumber daya alam yang dimiliki oleh Propinsi Maluku saja tetapi juga perlu meyakinkan para pelaku – pelaku usaha dan investor asing akan kondisi keamanan propinsi Maluku yang telah normal, terutama para investor – investor asing yang pernah menanamkan modalnya di Propinsi Maluku dan tidak lagi memperpanjang izinnya akibat konflik yang terjadi .



DAFTAR PUSTAKA

- A. A Baramuli, 1998, *Pemikiran Tentang Pembangunan Ekonomi dan Politik Masa Orde Baru*, Jayabaya University Press : Jakarta.
- Abdu Halim, 2003, *Analisa Investasi*, Salemba Empat, Jakarta
- Boediono, 1981, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Kota Kembang : Yogyakarta
- Darumurti, Rauta, 2003, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan*, Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Fisher, Simon, Dkk, 2000, *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, The British Concil : Jakarta.
- Hasan Imron, 2003, *Memikirkan Kembali Maluku dan Maluku Utara*, Lembaga Penerbit Universitas Hasanudin (Lephas) : Makassar.
- John Pieris, 2004, *Tragedi Maluku Sebuah Krisis Peradaban*, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.
- Hua, Ling, 2001, *Peran Jepang di Asia*, PT Gramedia Pustak Utama : Jakarta.
- Jatnika Sidik, 2001, *Otonomi Daerah Prespektif Hubungan Internasional*, Bigrae Publishing : Yogyakarta.
- Kastor, Rustam, 2000, *Konspirasi politik RMS dan Kristen menghancurkan Umat Islam di Ambon – Maluku*, Wihdah Perss : Yogyakarta.
- Kumpulan Makalah *Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se Indonesia (PNMHI, Oktober 2003)*.
- Koesnadi, Wahyudi B, 2001, *Teori dan Manajemen Konflik, (Tradisional Kontemporer Islam)*, Universitas Brawijaya : Malang.
- Mansoer, Fakhir, 2001, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Insit press bekerja sama dengan Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

Rumusan Seminar *Sehari Lembaga dan Laboratorium Islam Sunan Ampel*, 1999. :
Surabaya.

Rudi, T . May, 1993, *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional*,
Angkasa : Bandung.

....., 2003, *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah
Global*, Refika Aditama : Bandung.

....., 2002, *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca
Perang Dingin*, Refika Aditama : Bandung.

Saifuddin Fedyani. A, 1986, *Konflik dan Integrasi Perbedaan Paham dalam Agama
Islam*, Insit Press : Yogyakarta.

Sumartan, 2001, *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, Pustaka
Pelajar : Yogyakarta.

Suadi Marasabessy, 2002, *Maluku Baru Suatu Wujud Ideal Masyarakat Maluku
Pasca Konflik*, PT Abdi, : Jakarta

Winardi, 2004, *Manajemen Konflik, Konflik Perubahan dan Pembangunan*,
Mandar Maju : Bandung.



